

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	3
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	Error! Bookmark not defined.
2. NERACA.....	Error! Bookmark not defined.
3. LAPORAN OPERASIONAL	Error! Bookmark not defined.
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	Error! Bookmark not defined.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	Error! Bookmark not defined.
5.1. PENDAHULUAN	8
5.1.1. Latar Belakang	9
5.1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
5.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
5.1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	13
5.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	15
5.2.1. Ekonomi Makro	15
5.2.2. Kebijakan Keuangan	16
5.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	17
5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	30
5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	30
5.3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan....	Error! Bookmark not defined.
5.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	79
5.4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah	79
5.4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	81
5.4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	81
5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	86
5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	88
5.5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan.....	88
5.5.2. Pengungkapan atas pos – pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual	116
5.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	119
5.6.1. Visi dan Misi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur :	119
5.6.2. Domisili.....	119
5.6.3. Program Kegiatan Dinas Pendidikan Prov. Jatim	120
5.7. PENUTUP	127

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, maka dengan ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2019 berupa Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk menyusun dan menyajikan laporan Keuangan yang akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mampu memberikan informasi kepada pengguna (*stakeholders*).

Surabaya, Pebruari 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Gentengkali No. 33, Telp. (031) 5342706, 5342707, 5342708

Fax. (031) 5465413, 5346707 Kode pos 60275

S U R A B A Y A

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari (I) Laporan Realisasi Anggaran; (II) Neraca; (III) Laporan Operasional; (IV) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (V) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, Pebruari 2021

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT

Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

URUSAN : (101) Pendidikan
PEMERINTAHAN : (101) Pendidikan
ORGANISASI : (0100) Dinas Pendidikan

No	Uraian	2020			2019
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	1.470.936.639,80	39,25	1.660.137.119,75
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	375.000.000,00	1.470.936.639,80	392,25	1.660.137.119,75
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	30.000.000,00	16.100.000,00	53,67	86.240.000,00
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	345.000.000,00	1.454.836.639,80	421,69	1.573.897.119,75
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		375.000.000,00	1.470.936.639,80	392,25	1.660.137.119,75
5	BELANJA DAERAH	6.367.322.025.746,45	6.175.247.888.372,80	96,98	6.150.028.543.588,05
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.556.010.422.011,72	3.519.703.219.916,00	98,98	3.655.857.774.466,71
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	3.556.010.422.011,72	3.519.703.219.916,00	98,98	3.655.857.774.466,71
5.2	BELANJA LANGSUNG	2.811.311.603.734,73	2.655.544.668.456,80	94,46	2.494.170.769.121,34
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	393.609.873.500,00	391.780.393.870,00	99,54	311.442.859.887,00
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	1.909.711.233.276,73	1.785.418.971.580,80	93,49	1.547.226.304.990,34
5.2.3	BELANJA MODAL	507.990.496.958,00	478.345.774.006,00	94,16	635.501.604.244,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		6.367.322.025.746,45	6.175.248.359.372,80	96,98	6.150.028.543.588,05
SURPLUS / (DEFISIT)		(6.366.947.025.746,45)	(6.173.777.422.733)	96,97	(6.188.321.691.167,03)
Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)		(6.366.947.025.746,45)	(6.173.777.422.733)	96,97	(6.188.321.691.167,03)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NERACA

per 31 Desember Tahun 2020 dan Tahun 2019

Urusan Pemerintahan : (101) Pendidikan
Organisasi : (0100) Dinas Pendidikan

URAIAN	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
AKTIVA		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	11.953.152.998,65	39.962.332.636,73
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	882.613.627,50	1.921.899.006,50
Aset Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	12.835.766.626,15	41.884.231.643,23
ASET TETAP		
ASET TETAP		
Tanah	1.738.026.109.444,00	1.736.274.709.444,00
Peralatan dan Mesin	2.546.666.151.093,30	2.064.228.900.499,30
Gedung dan Bangunan	3.170.334.159.070,00	3.024.004.661.461,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.493.492.957,00	20.074.518.707,00
Aset Tetap Lainnya	263.947.128.481,30	201.393.772.507,30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.681.955.987,00	1.524.421.725,00
Akumulasi Penyusutan	-2.645.437.361.011,00	(2.268.763.129.101,00)
JUMLAH ASET TETAP	5.099.711.636.021,60	4.778.737.855.242,60
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Aset Tetap Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	6.807.902.940,00	5.995.454.457,00
Aset Lain-lain	946.999.000,00	946.999.000,00
URAIAN	Tahun 2020	Tahun 2019

	(Rp)	(Rp)
JUMLAH ASET LAINNYA	7.754.901.940,00	5.580.782.538,00
JUMLAH AKTIVA	5.118.550.904.587,75	4.489.527.314.871,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	306.249.999,92	179.999.999,96
Utang Belanja	242.263.388,00	312.654.402,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	548.513.387,92	492.654.401,96
JUMLAH KEWAJIBAN	548.513.387,92	492.654.401,96
EKUITAS		
Ekuitas	(16.883.262.619.977,40)	(12.069.400.955.594,50)
Ekuitas	(10.955.715.869.639,40)	(6.220.976.238.124,79)
Surplus/Defisit – LO	(5.927.546.750.337,96)	(5.848.424.717.469,60)
Ekuitas SAL	0,00	0,00
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	22.003.016.411.177,20	16.896.472.841.535,30)
JUMLAH EKUITAS	5.119.753.791.199,83	4.827.071.885.940,87
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.120.302.304.587,75	4.827.564.540.342,83



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dinas Pendidikan
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
DAN 2019

No.	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan	%
	KEGIATAN OPERASIONAL				
1	PENDAPATAN - LO	873.249.253,84	1.773.470.453,28	(900.221.199,44)	(50,76)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1.344.686.639,84	1.773.470.453,28	(428.783.813,44)	(24,18)
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	16.100.000,00	86.240.000,00	(70.140.000,00)	(81,33)
1.1.2	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	1.328.586.639,84	1.687.230.453,28	(358.643.813,44)	(21,26)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1.344.686.639,84	1.773.470.453,28	(428.783.813,44)	(24,18)
2	BEBAN	5.928.891.436.977,80	5.850.198.187.922,95	78.221.811.668,85	1,34
2.1	BEBAN OPERASI - LO	5.928.419.999.591,80	5.850.198.187.922,95	78.221.811.668,85	1,34
2.1.1	Beban Pegawai - LO	3.911.483.613.786,00	3.967.300.634.353,71	(55.817.020.567,71)	(1,41)
2.1.2	Beban Barang dan Jasa	1.412.043.954.441,80	1.394.669.938.149,67	17.374.016.292,13	1,25
2.1.3	Beban Hibah	183.983.236.903,00	142.455.058.290,00	41.528.178.613,00	29,15
2.1.4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	373.608.130.817,00	265.635.344.865,00	107.972.785.952,00	40,65
2.1.5	Beban Lain-lain - LO	47.301.063.644,00	80.137.212.264,57	(32.836.148.620,57)	(40,97)
	JUMLAH BEBAN OPERASI - LO	5.928.419.999.591,80	5.850.198.187.922,95	78.221.811.668,85	1,34
1.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	471.437.386,00	0,00	471.437.386,00	0,00
1.4.1	Surplus Pemindahtanganan /Pemusnahan Aset Non Lancar - LO	471.437.386,00	0,00	471.437.386,00	0,00
	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	471.437.386,00	0,00	471.437.386,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT - LO	(5.927.546.750.337,96)	(5.848.424.717.469,67)	(79.122.032.868,29)	(1,35)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020
DAN 2019

NO	URAIAN	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	4.827.071.885.940,87	4.488.984.531.249,51
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(5.927.546.750.337,96)	(5.848.424.717.469,67)
3	EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.106.543.569.641,92	6.188.330.739.105,03
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / PENYESUAIAN EKUITAS	1.113.685.085.955,00	(1.818.666.944,00)
5	EKUITAS AKHIR	5.119.753.791.199,83	4.827.071.885.940,87

1.1. PENDAHULUAN

1.1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dalam pelaporan keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) entitas yaitu :

1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu entitas akuntansi yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan oleh karenanya wajib menyusun Laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Dinas Pendidikan berdasarkan standar akuntansi berbasis akrual seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang diterapkan dalam APBD. Basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sedangkan Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam Penyajian Laporan Keuangannya terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu elemen laporan keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, di dalam CaLK juga dapat dijelaskan berbagai faktor, asumsi, dan kondisi yang mempengaruhi angka-angka Laporan Keuangan.

1.1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.2.1. Maksud

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Kebijakan Keuangan APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan Keuangan ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di bidang pendidikan di Jawa Timur.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2.2. Tujuan

Pelaporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan dan pengeluarannya dan sebagai bahan pertimbangan serta evaluasi bagi pengalokasian anggaran.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ini disusun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 97 tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2015;
16. Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019;

1.1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya menjadi Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, indikator tersebut adalah:

1. Masukan (Input), yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan.
2. Keluaran (Output) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. Hasil (Outcome) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Manfaat (Benefit) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan pemerintah daerah dari hasil.
5. Dampak (Impact) adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap makro yang ingin dicapai dari manfaat.

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini akan dominan berbentuk narasi deskriptif dengan penjelasan-penjelasan tambahan yang singkat dan jelas disertai angka-angka. Cara penulisan ini diharapkan akan dapat memberi penjelasan yang memadai tentang aktivitas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang tergambar melalui laporan keuangan.

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan dibagi dalam 7 bagian dengan rincian pembahasan sebagai berikut :

- 1.1.** : Pendahuluan
 - 1.1.1. Latar Belakang
 - 1.1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

- 1.2.** : Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
 - 1.2.1. Ekonomi makro
 - 1.2.2. Kebijakan Keuangan
 - 1.2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

- 1.3.** Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 1.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 1.3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

- 1.4.** : Kebijakan Akuntansi
 - 1.4.1. Entitas akuntansi keuangan daerah
 - 1.4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 1.4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 1.4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

- 1.5.** : Penjelasan pos-pos laporan keuangan
 - 1.5.1 Rincian dan penjelasan masing – masing pos – pos pelaporan keuangan
 - 1.5.2. Pengungkapan atas pos – pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

- 1.6.** : Penjelasan atas informasi – informasi non keuangan

- 1.7.** : Penutup

1.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1.2.1. Ekonomi Makro

Dalam perkembangannya, pranata ekonomi memelihara kelangsungan sistem nilainya tidak pernah lepas dari keterkaitan dengan ruang-ruang sosial lainnya baik itu pranata politik, pendidikan, kemasyarakatan atau keluarga maupun agama. Disini dapat diamati karakteristik hubungan pranata sosial dalam masyarakat terkini yang cenderung bersifat kompleks, fungsional, independen, serta memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mampu menjabarkan sebuah pola hubungan yang bersifat sistemik konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana kedua komponen lembaga tersebut merupakan aset negara yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati dan cermat.

Secara lebih khusus hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian infrastruktur dan sarana-sarana yang melayani kehidupan masyarakat kini beralih tangan menjadi wewenang negara. Secara lebih luas otomatis perubahan struktur sosial politik berdampak bergesernya format hubungan antara lembaga sosial ekonomi dengan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tetap berkorelasi kuat dengan praktik pendidikan sebagai pencetak operator pelaksana transformasi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

Realitas globalisasi yang demikian membawa sejumlah implikasi bagi pengembangan SDM di Indonesia. Salah satu tuntutan globalisasi adalah daya saing ekonomi. Daya saing ekonomi akan terwujud bila didukung oleh SDM yang handal. Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subjek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu, dimensi daya saing dalam SDM semakin

menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tuntutan globalisasi seyogyanya kebijakan *link and match* mendapat tempat sebagai sebuah strategi yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan pendidikan. Namun sayangnya ide *link and match* yang tujuannya untuk menghubungkan kebutuhan tenaga kerja dengan dunia pendidikan belum ditunjang oleh kualitas kurikulum sekolah yang memadai untuk menciptakan lulusan yang siap kerja. Penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah salah satu jalur menuju ke sana.

Oleh karena itu harus ada perubahan paradigma, agar proses pembangunan mampu mendorong terbentuknya berbagai keahlian yang bisa mengolah SDA dan bisa semakin memandirikan struktur ekonomi bangsa. Supaya visi tersebut pun terjadi di berbagai daerah, maka harus ada koreksi total kebijakan pembangunan pendidikan di tingkat makro dengan berbasiskan kepada pluralitas daerah. Dengan demikian harapannya akan tercipta SDM yang mampu memperjuangkan kebutuhan dan penguatan masyarakat lokal.

1.2.2. Kebijakan Keuangan

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Pertanggungjawaban keuangan ini digunakan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik sebagai perwujudan asas transparansi, demokrasi dan akuntabilitas dalam rangka perwujudan *Good Governance*.

Dalam pendekatan kinerja, maka usulan program, kegiatan dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya melalui rasionalisasi dan sinkronisasi program, dengan demikian laporan pertanggungjawaban keuangan Organisasi Perangkat Daerah harus memuat hal-hal dibawah ini agar dapat dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan bagi pengalokasian anggaran :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan dan pengeluarannya.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
7. Sebagai pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah atas pelaksanaan anggaran yang diberikan.
8. Sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur antara lain :

Tabel 5-1 Indikator Pencapaian Target Kinerja

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
	Program Pelayanan Kesekretariatan			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	59 Dokumen
2	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	Laporan	17 Laporan

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
3	Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Ketatausahaan Dan Kepegawaian	Dokumen	6 Dokumen
	Program Pengembangan Teknis Ketrampilan Kejuruan (Inkubator)			
4	Penyelenggaraan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Ketrampilan dan Kejuruan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Inkubator Bisnis Jumlah Peserta yang Mengikuti Kompetensi Vokasi	Orang Orang	800 Orang 800 Orang
5	Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan	Jumlah Dokumen	Dokumen	800 Dokumen
6	Penyelenggaraan Materi Metode Pelatihan Berbasis Ketrampilan Vokasi	Jumlah Dokumen Materi Pelatihan Inkubator Bisnis Jumlah Dokumen Materi Pelatihan Kompetensi Vokasi	Dokumen Dokumen	24.000 Dokumen 24.000 Dokumen
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo			
7	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya	Jumlah Dokumen	Dokumen	3.000 Dokumen
8	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	474.000 Lembaga
9	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	185.000 Lembaga
10	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	77.713 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang			
11	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Malang	Jumlah dokumen	Dokumen	3 Dokumen
12	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kabupaten Malang	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	74 Lembaga
13	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Malang	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	138 Lembaga
14	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Malang	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	24.203 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kota Malang			

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
15	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kota Malang dan Kota Batu	Jumlah Dokumen	Dokumen	3.000 Dokumen
16	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kota Malang dan Kota Batu	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	79 Lembaga
17	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Malang dan Kota Batu	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	69 Lembaga
18	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kota Malang dan Kota Batu	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	39.234 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo			
19	Pelaksanaan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
20	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	56 Lembaga
21	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	76 Lembaga
22	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	52.602 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung			
23	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
24	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	60 Lembaga
25	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Tulungagung dan kabupaten Trenggalek	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	72 Lembaga
26	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	43.675 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik			
27	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Gresik	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
28	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Gresik	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	60 Lembaga
29	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Gresik	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	60 Lembaga
30	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Gresik	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	749.000 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto			
31	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
32	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di di Kabupaten/ Kota Mojokerto	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	69 Lembaga
33	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di di Kabupaten/ Kota Mojokerto	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	76 Lembaga
34	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Mojokerto	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	26.282 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang			
35	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Jombang	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
36	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Jombang	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	68 Lembaga
37	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Jombang	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	69 Lembaga
38	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Jombang	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	19.177 Siswa

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro			
39	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
40	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	105 Lembaga
41	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Tuban	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	104 Lembaga
42	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	54.597 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan			
43	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Lamongan	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
44	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Lamongan	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	80 Lembaga
45	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	78 Lembaga
46	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Lamongan	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	18.696 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun			
47	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
48	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	32 Lembaga

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
49	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	24 Lembaga
50	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	47.530 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan			
51	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pacitan	Jumlah Dokumen	Dokumen	3.000 Dokumen
52	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Pacitan	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	16.000 Lembaga
53	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Pacitan	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	32.000 Lembaga
54	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Pacitan	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	153.000 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri			
55	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Kediri	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
56	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Kediri	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	93 Lembaga
57	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Kediri	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	74 Lembaga
58	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Kediri	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	35.711 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk			
59	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Nganjuk	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
60	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Nganjuk	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	109 Lembaga
61	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Nganjuk	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	109 Lembaga
62	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Nganjuk	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	23.214 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar			
63	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Blitar	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
64	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/Kota Blitar	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	51 Lembaga
65	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Blitar	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	50 Lembaga
66	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Blitar	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	27.860 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan			
67	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Pasuruan	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
68	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Pasuruan	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	66 Lembaga
69	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Pasuruan	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	78 Lembaga
70	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Pasuruan	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	31.813 Siswa

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
	Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)			
71	Penyelenggaraan DAK Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah Lembaga PK-PLK yang Mendapat DAK untuk Pemenuhan Sarana Prasarana	Lembaga	135 Lembaga
72	Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah lembaga SLB yang menyelenggarakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah/ujian nasional jenjang SDLB, SMPLB, SMALB	Lembaga	152 Lembaga
		Jumlah lembaga SLB yang menerapkan kurikulum pendidikan khusus	Lembaga	150 Lembaga
		Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan inklusif	Lembaga	150 Lembaga
		Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan	Orang	0 Orang
		Jumlah lembaga SLB menjadi pusat sumber pendidikan inklusif atau unit layanan disabilitas	Lembaga	150 Lembaga
73	Mutu Prestasi Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah siswa SLB yang mengikuti pengembangan potensi di bidang Ketrampilan, Seni, Olahraga dan Literasi	Siswa	300 Siswa
		Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa non akademik	Siswa	25 Siswa
74	Manajemen Kelembagaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	Jumlah peserta kegiatan yang dikembangkan dan diselaraskan kualitas PK-PLK dengan industry	Orang	15 Orang
		Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Lembaga	50 Lembaga
75	Sarana dan Prasarana PK-PLK	Jumlah lembaga yang mendapat bantuan sarana prasarana	Lembaga	14 Lembaga
		Jumlah peserta kegiatan yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana prasarana pendidikan	Orang	0 Orang
76	Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus	Jumlah Siswa SLB yang Mendapat Bantuan Operasional Sekolah	Siswa	2.878 Siswa
	Program Pendidikan Menengah Atas			
77	Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Kegiatan Yang Mendapatkan Pelatian Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan	Orang	423 Orang
		Jumlah Lembaga Yang Mendapatkan Bantuan Sarana Dan Prasarana	Lembaga	423 Lembaga
78	Mutu dan Relevansi Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah lembaga yang mendapatkan pemenuhan standart nasional pendidikan SMA yang bermutu	Lembaga	1.266 Lembaga
		Persentase kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah	%	79.480 %

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
79	Mutu prestasi peserta didik sekolah menengah Atas	Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba/olimpiade prestasi akademik dan non akademik	Siswa	4.989 Siswa
		Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa akademik dan non akademik	Siswa	300 Siswa
80	Penyelenggaraan DAK pendidikan sekolah menengah atas	Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan Bantuan DAK untuk pemenuhan sarana prasarana	Lembaga	
81	Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo	Jumlah Peserta Didik Yang Memiliki Bakat Istimewa	Siswa	220.000 Siswa
82	Manajemen Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Yang Bekerjasa Sama Dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha Dan Dunia Industri	Lembaga	500 Lembaga
83	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Atas	Siswa	1.000.000 Siswa
	Program Pendidikan Menengah Kejuruan			
84	Mutu dan relevansi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lembaga yang mendapatkan standart nasional pendidikan SMK yang bermutu	Lembaga	5.768 Lembaga
85	Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK	Jumlah Siswa SMK yang Mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah	Orang	394.900.000 Orang
86	Manajemen Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Metode Pembelajaran Teaching Factory (TEFA)	Lembaga	1.600 Lembaga
		Jumlah peserta kegiatan yang dikembangkan dan diseleraskan kualitas SMK dengan Industri	Orang	456 Orang
		Jumlah lembaga yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri	Lembaga	2118 Lembaga
		Jumlah sekolah yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1	Lembaga	2118 Lembaga
		Jumlah sekolah yang memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK)	Lembaga	2118 Lembaga
87	Mutu Prestasi Peserta Didik SMK	Jumlah Peserta didik yang mengikuti lomba/olimpiade prestasi akademik dan non akademik sesuai dengan bidang dan keahliannya	Siswa	500 Siswa
		Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa akademik dan non akademik	Siswa	500 Siswa

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
88	Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	Lembaga	484 Lembaga
		Jumlah peserta kegiatan yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana prasarana pendidikan	Orang	1.520 Orang
89	Penyelenggaraan DAK Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan bantuan DAK untuk pemenuhan sarana dan prasarana	Lembaga	251.000 Lembaga
	Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan			
90	Pengembangan Metode belajar Mengajar Menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi	Jumlah guru yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pengembangan metode pembelajaran	Guru	1.368 Guru
91	Penyebarluasan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Jumlah guru dan siswa yang mendapatkan akses pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Orang	1.500 Orang
92	Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TKIP)	Jumlah Dokumen	Dokumen	5 Dokumen
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo			
93	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Probolinggo	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
94	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	100 Lembaga
95	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Probolinggo	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	74 Lembaga
96	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Probolinggo	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	23.206 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember			
97	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
98	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	116 Lembaga
99	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	217 Lembaga

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
100	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	1.404.000 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso			
101	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo	Jumlah Dokumen	Dokumen	3.000 Dokumen
102	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	57.000 Lembaga
103	Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	96.000 Lembaga
104	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	26.685 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi			
105	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi	Jumlah Dokumen	Dokumen	3.000 Dokumen
106	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Banyuwangi	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	99.000 Lembaga
107	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Banyuwangi	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	86.000 Lembaga
108	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Banyuwangi	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	1.090.000 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan			
109	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangkalan	Jumlah Dokumen	Dokumen	3.000 Dokumen
110	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bangkalan	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	72 Lembaga
111	Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	65 Lembaga
112	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bangkalan	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	15.673 Siswa

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang			
113	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sampang	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
114	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sampang	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	83 Lembaga
115	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sampang	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	82 Lembaga
116	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sampang	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	8.823 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan			
117	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen	Dokumen	3 Dokumen
118	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Pamekasan	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	83 Lembaga
119	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Pamekasan	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	94 Lembaga
120	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Pamekasan	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	10.454 Siswa
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep			
121	Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen	Dokumen	5.000 Dokumen
122	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sumenep	Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Lembaga	89.000 Lembaga
123	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sumenep	Jumlah Lembaga SMK yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Lembaga	67.000 Lembaga
124	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sumenep	Jumlah Siswa yang Mendapatkan BPOPP	Siswa	9.908 Siswa

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KELUARAN	SATUAN	SASARAN
	Program penyelenggaraan Tugas Pembantuan			
125	Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar, Serta Fungsi Penyelenggara Bantuan	Jumlah Dokumen	Dokumen	2 Dokumen
126	Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Jumlah Dokumen	Dokumen	38.000 Dokumen
	Program Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan			
127	Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan penghasilan	%	100 %
128	Pendidikan Lanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB berkualifikasi S1/D4	%	98,2%
129	Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang ditingkatkan kompetensi SDM dan kinerjanya Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan PK-PLK yang mendapatkan peningkatan kompetensi	% Orang	24 % 1.614 Orang
130	Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi tingkat Nasional dan Internasional Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan berprestasi dan berdedikasi	% Orang	60 % 100 Orang
131	Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan layanan manajemen karir	%	40%
132	Perlindungan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan hukum	%	60%

1.3. IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

1.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1.3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan

Tabel 5-2 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2020

No.	Uraian	TA 2020			TA 2019
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	Rp.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	375.000.000,00	1.470.936.639,80	1.095.936.639,80	1.660.137.119,75
1.1	RETRIBUSI DAERAH	30.000.000,00	16.100.000,00	(13.900.000,00)	86.240.000,00
1.2	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	345.000.000,00	1.454.836.639,80	1.109.836.639,80	1.573.897.119,75
JUMLAH PENDAPATAN		375.000.000,00	1.470.936.639,80	1.095.936.639,80	1.660.137.119,75

Pendapatan Asli Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 375.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.470.936.639,80 atau mencapai 392,25 % dari target yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Retribusi daerah dengan anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.16.100.000 atau 53,67 %;
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan anggaran sebesar Rp. 345.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.454.836.639,80 atau 421,69 %.

Jika diperbandingkan antara realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2019 nampak adanya penurunan sebesar Rp.70.140.000,00 atau 81,33% pada Retribusi Daerah dan penurunan sebesar Rp.119.060.479,95 atau 7,56% pada lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.3.1.2. Target dan Realisasi Belanja

1.3.1.2.1. Belanja Tidak Langsung

Tabel 5-3 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	Realisasi
Gaji dan Tunjangan	3.420.089.672.011,72	3.396.260.441.503,00	(36.307.202.095,72)	3.517.782.797.963,54
Tambahan Penghasilan PNS	135.920.750.000,00	123.442.778.413,00	(12.477.971.587)	138.074.976.503,17
Insentif Pemungutan Restribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Pegawai - BTL	3.556.010.422.011,72	3.519.703.219.916,00	(36.307.202.095,72)	3.655.857.774.466,71

Berdasarkan capaian realisasi belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp. 3.519.703.219.916,00 dari total anggaran sebesar Rp. 3.556.010.422.011,72 atau 98,98%, yang berarti belanja tidak

langsung Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah efisien. Jika diperbandingkan antara Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 terdapat peningkatan penyerapan anggaran dimana sebelumnya penyerapan tahun 2019 sebesar 91,63% dan di tahun 2020 98,98 % terdapat kenaikan penyerapan sebesar 7,35%.

1.3.1.2.2. Belanja Langsung

Tabel 5-4 Target dan Realisasi Belanja Langsung TA 2020

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	Realisasi
Belanja Pegawai	393.609.873.500,00	391.780.393.870,00	(1.829.479.630)	311.442.859.887,00
Belanja Barang dan Jasa	1.909.711.233.276,73	1.785.418.971.580,80	(124.292.261.695,93)	1.547.226.304.990,34
Belanja Modal	507.990.496.958,00	478.345.774.006,00	(29.644.722.952)	635.501.604.244,00
Total Belanja Langsung	2.811.311.603.734.73	2.655.545.139.456,80	(155.766.464.277,93)	2.494.170.769.121,34

1. Program Pelayanan Kesekretariatan

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 5.036.374.558,00 terealisasi sebesar Rp. 4.860.584.473,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 96,51%.

Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

Hasil : Nilai evaluasi implementasi Sakip Dinas Pendidikan

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 3,49% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah berjalan dengan lancar sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efektif.

b. Pengelolaan Administrasi Keuangan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 2.820.867.060,00 terealisasi sebesar Rp. 2.450.620.813,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 86,87%.

Keluaran : Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan

Hasil : Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 13,13% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah memenuhi target sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efektif.

c. **Ketatausahaan dan Kepegawaian**

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 50.204.065.568,00 terealisasi sebesar Rp. 47.193.784.137,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 94,00%.

Keluaran : Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian

Hasil : Nilai evaluasi implementasi SAKIP Dinas Pendidikan

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 6,00% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah memenuhi target sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efektif.

2. Program Pengembangan teknis ketrampilan Kejuruan (Inkubator)

a. **Penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis ketrampilan dan kejuruan**

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 793.278.000,00 terealisasi sebesar Rp. 791.631.360,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,79%.

Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti inkubator bisnis
Jumlah peserta yang mengikuti kompetensi vokasi

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,21% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis ketrampilan dan kejuruan berjalan dengan lancar, sehingga kegiatan telah dikatakan efektif.

b. **Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan**

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 2.439.822.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.408.063.017,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,70%.

Keluaran : Jumlah Dokumen

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran

sebesar 1,3% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan Prov. Jatim telah berjalan dengan lancar sehingga kegiatan telah dikatakan efektif.

c. Penyelenggaraan materi metode pelatihan berbasis ketrampilan vokasi

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 210.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 209.752.160,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,88%.

Keluaran : Jumlah dokumen materi pelatihan inkubator bisnis
Jumlah dokumen materi pelatihan kompetensi vokasi

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,12% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan tersebut telah berjalan dengan lancar dan efektif

3. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo

a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 545.369.919,00 terealisasi sebesar Rp. 528.365.591,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 96,88%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 3,12% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan tersebut telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 122.450.000,00 terealisasi sebesar Rp. 122.038.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,66%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,34% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan tersebut telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 12.150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 12.150.000,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 100%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,00% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan tersebut telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 108.419.040.000,00 terealisasi sebesar Rp. 86.581.594.377,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 79,86%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 20,14% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya telah berjalan dengan lancar sehingga namun belum efektif.

4. Program manajemen pelayanan pendidikan wilayah Kabupaten Malang

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Malang
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 474.201.616,00 terealisasi sebesar Rp. 463.120.607,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 97,66%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran

sebesar 2,34% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan penyelenggaraan penatausahaan cabang dinas pendidikan di Kabupaten Malang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kabupaten Malang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 33.676.000,00 terealisasi sebesar Rp. 27.376.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 81,29%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 28,71% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kabupaten Malang belum berjalan dengan lancar dan efektif.

- c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Malang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 9.840.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.790.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,49%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,51% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Malang telah berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan kegiatan telah efektif.

- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Malang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 22.788.360.000,00 terealisasi sebesar Rp. 20.584.504.310,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 90,33%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 9,67% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Malang telah berjalan dengan lancar dan dapat dikatakan kegiatan telah efektif.

5. Program manajemen pelayanan pendidikan wilayah Malang

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kota Malang dan Kota Batu
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 528.932.976,00 terealisasi sebesar Rp. 521.125.903,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,52%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,48% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kota Malang dan Kota Batu telah berjalan dengan lancar sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efektif.
- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kota Malang dan Kota Batu
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 3.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.750.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kota Malang dan Kota Batu sudah berjalan dengan lancar sehingga telah dapat dikatakan kegiatan telah efektif.
- c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di

Kota Malang dan Kota Batu

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 9.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.500.000,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 100%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Malang dan Kota Batu telah berjalan dengan lancar sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efektif.

- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kota Malang dan Kota Batu

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 59.882.085.000,00 terealisasi sebesar Rp. 53.514.636.618,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 89,37%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 10,63% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kota Malang dan Kota Batu telah berjalan dengan lancar sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efektif.

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo

- a. Pelaksanaan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 500.434.220,00 terealisasi sebesar Rp. 491.413.810,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 98,20%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,80% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan telah berjalan dengan lancar dan kegiatan telah efektif.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 30.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 30.584.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,62%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan
- Hasil : Meningkatnya kualitas Manajemen pelayanan pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terlihat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,38% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan telah berjalan dengan lancar sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efektif.
- c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.613.500,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 72,27%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Meningkatnya kualitas Manajemen pelayanan pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 27,73% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.
- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 29.601.045.000,00 terealisasi sebesar Rp. 26.695.059.250,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 90,18%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

- Hasil : Meningkatnya kualitas Manajemen pelayanan pendidikan di Cabang Dinas Pendidikan
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 9,92% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 437.672.228,00 terealisasi sebesar Rp. 436.569.408,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 99,75%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,25% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 97.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 96.725.590,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 99,21%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,79% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan lancar dan telah efektif.

- c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 493.900,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 98,78%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,22% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 42.150.420.000,00 terealisasi sebesar Rp. 38.332.366.148,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 90,94%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 9,06% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek telah berjalan dengan lancar dan efektif.

8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Gresik
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 572.740.000,00 terealisasi sebesar Rp. 567.895.693,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 99,15%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,85% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Gresik telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Gresik

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 18.490.000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.035.500,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 92,13%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 7,87% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Gresik telah berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Gresik

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 13.900.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.873.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 85,42%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 14,58% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Gresik telah berjalan dengan lancar dan telah efektif.

d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Gresik

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 18.236.160.000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.172.306.764,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 94,17%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 5,83% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, pelaksanaan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Gresik telah berjalan dengan lancar dan efektif.

9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto

a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota

Mojokerto

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 463.832.096,00 terealisasi sebesar Rp. 456.301.606,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,38%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,62% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Mojokerto telah berjalan dengan lancar dan telah efektif.

b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di di Kabupaten/ Kota Mojokerto

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 51.050.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.951.460,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,81%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,19% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di di Kabupaten/ Kota Mojokerto telah berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di di Kabupaten/ Kota Mojokerto

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 4.502.500,00 terealisasi sebesar Rp. 4.502.500,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di di Kabupaten/ Kota Mojokerto telah berjalan dengan lancar dan efektif.

d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di

Kabupaten/Kota Mojokerto

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 30.547.170.000,00 terealisasi sebesar Rp. 27.950.198.050,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 91,50%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 8,50% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Mojokerto telah berjalan dengan lancar dan efektif.

10. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jombang

a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Jombang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 633.894.085,00 terealisasi sebesar Rp. 633.888.717,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,99%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,01% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Jombang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 22.520.000,00 terealisasi sebesar Rp. 22.520.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Jombang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 22.920.000,00 terealisasi sebesar Rp. 22.920.000,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 100%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Jombang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 17.755.605.000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.753.611.700,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 99,99%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,01% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Jombang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

11. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro

a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 525.818.320,00 terealisasi sebesar Rp. 522.095.919,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 99,29%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,71% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban telah berjalan dengan lancar dan telah efektif.

- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 7.015.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.985.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,57%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan Pelayanan Pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,43% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Tuban

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 30.000,00 terealisasi sebesar Rp.0,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 0%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 100% sehingga dapat dikatakan kegiatan tidak efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Tuban tidak berjalan dengan lancar dan belum efektif.

- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 63.788.805.000,00 terealisasi sebesar Rp. 58.930.890.100,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 92,38%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 7,62% sehingga dapat dikatakan kegiatan tidak efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban telah berjalan dengan lancar dan sudah efektif.

12. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Lamongan
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 446.790.176,00 terealisasi sebesar Rp. 446.122.796,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,85%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,15% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Lamongan telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Lamongan
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 66.255.000,00 terealisasi sebesar Rp. 65.489.550,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,84%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,16% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Lamongan telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 5.625.000,00 terealisasi sebesar Rp.0,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 0%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan teknis
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 100% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan tidak berjalan dengan lancar dan belum efektif.

- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Lamongan

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 15.366.240.000,00 terealisasi sebesar Rp.14.120.727.722,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 91,89%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran 8,11% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Lamongan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

13. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 629.134.500,00 terealisasi sebesar Rp. 606.319.260,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 96,37%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 3,63% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 147.686.500,00 terealisasi sebesar Rp. 147.377.500,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,79%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,21% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis

Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 1.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 49.892.310.000,00 terealisasi sebesar Rp.46.233.891.777,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 92,67%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 7,33% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi telah berjalan dengan lancar dan efektif.

14. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pacitan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 486.965.056,00 terealisasi sebesar Rp. 486.242.494,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,85%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,15% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan

Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pacitan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Pacitan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 25.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 25.579.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,92%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan Pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,08% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Pacitan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Pacitan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.4.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.200.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.

Keluaran : Jumlah lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Pacitan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Pacitan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 12.411.630.000,00 terealisasi sebesar Rp.10.760.252.063,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 86,69%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 13,31% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Pacitan telah

berjalan dengan lancar dan efektif.

15. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Kediri
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 547.827.176,00 terealisasi sebesar Rp. 545.740.671,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,62%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,38% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Kediri telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Kediri
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 1.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.250.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Kediri telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Kediri
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 250.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Kediri telah berjalan

dengan lancar dan efektif.

- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Kediri

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 37.383.885.000,00 terealisasi sebesar Rp.34.666.020.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 92,73%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 7,27% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Kediri telah berjalan dengan lancar dan efektif.

16. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp.498.149.132,00 terealisasi sebesar Rp.490.414.481,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,45%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,55% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Nganjuk telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 20.807.000,00 terealisasi sebesar Rp. 20.771.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,83%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,17% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Nganjuk telah

berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.1.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.990.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Nganjuk telah berjalan dengan lancar dan efektif.

d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 20.787.615.000,00 terealisasi sebesar Rp.20.785.406.195,80 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,99%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,01% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Nganjuk telah berjalan dengan lancar dan efektif.

17. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar

a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Blitar

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 498.800.296,00 terealisasi sebesar Rp. 498.388.395,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,92%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,08% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Blitar

telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/Kota Blitar

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 39.775.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.383.582,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,02%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,98% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/Kota Blitar telah berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Blitar

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 747.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,60%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,40% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Blitar telah berjalan dengan lancar dan efektif.

d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Blitar

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 28.294.920.000,00 terealisasi sebesar Rp.28.255.189.640,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,86%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,14% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Blitar telah berjalan dengan lancar dan efektif.

18. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Pasuruan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 528.682.036,00 terealisasi sebesar Rp. 522.726.811,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,87%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,13% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Pasuruan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Pasuruan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 2.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 0%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 100% sehingga dapat dikatakan kegiatan tidak efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Pasuruan belum berjalan dengan lancar dan tidak efektif.

- c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Pasuruan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.6.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.500.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Pasuruan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Pasuruan

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 33.255.900.000,00 terealisasi sebesar Rp.30.973.453.395,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 93,14%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 6,86% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Pasuruan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

19. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)

- a. Penyelenggaraan DAK Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 13.302.239.000,00 terealisasi sebesar Rp.13.257.790.540,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,67%.
- Keluaran : Jumlah lembaga PK-PLK yang mendapat DAK untuk pemenuhan sarana prasarana
- Hasil : Prosentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan bermutu
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,33% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan DAK Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- b. Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 2.765.795.900,00 terealisasi sebesar Rp. 2.428.455.200,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 87,80%.
- Keluaran : Jumlah lembaga SLB yang menyelenggarakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah/ujian nasional jenjang SDLB, SMPLB, SMALB
- Jumlah lembaga SLB yang menerapkan kurikulum pendidikan khusus
- Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan inklusif

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan

Jumlah lembaga SLB menjadi pusat sumber pendidikan inklusif atau unit layanan disabilitas

- Hasil : Prosentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan bermutu
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 12,2% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus telah berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Mutu Prestasi Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 2.683.175.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.530.299.430,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 94,30%.
- Keluaran : Jumlah siswa SLB yang mengikuti pengembangan potensi di bidang Ketrampilan, Seni, Olahraga dan Literasi
Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa non akademik
- Hasil : Prosentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan bermutu
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 5,70% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu Prestasi Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus telah berjalan dengan lancar dan efektif.

d. Manajemen Kelembagaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 1.090.952.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.068.372.625,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 97,93%.
- Keluaran : Jumlah peserta kegiatan yang dikembangkan dan diselaraskan kualitas PK-PLK dengan industri
Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri
- Hasil : Prosentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan bermutu
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 2,07% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Manajemen Kelembagaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus telah berjalan dengan lancar dan efektif.

e. Sarana dan Prasarana PK-PLK

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 7.369.414.800,00 terealisasi sebesar Rp. 6.791.902.550,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 92,16%.

Keluaran : Jumlah lembaga yang mendapat bantuan sarana prasarana
Jumlah peserta kegiatan yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana prasarana pendidikan

Hasil : Prosentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan bermutu

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 7,84% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Sarana dan Prasarana PK-PLK telah berjalan dengan lancar dan efektif.

f. Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 11.472.300.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.069.826.406,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 96,49%.

Keluaran : Jumlah siswa SLB yang mendapat Bantuan operasional Sekolah

Hasil : Prosentase anak berkebutuhan khusus (ABK) yang mendapatkan layanan pendidikan bermutu

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 52,48% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus telah berjalan dengan lancar dan efektif.

20. Program Pendidikan Menengah Atas

a. Sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 16.413.250.150,00 terealisasi sebesar Rp.10.774.474.237,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 65,64%.

Keluaran : Jumlah peserta kegiatan yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana prasarana pendidikan
Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 34,36% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Sarana dan prasarana Sekolah Menengah Atas belum berjalan dengan lancar dan belum efektif.
- b. Mutu dan Relevansi Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 4.214.509.600,00 terealisasi sebesar Rp. 3.807.680.602,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 90,35%.
- Keluaran : Jumlah lembaga yang mendapatkan pemenuhan standart nasional pendidikan SMA yang bermutu
Persentase kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah
- Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 9,65% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Sekolah Menengah Atas telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Mutu Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 1.735.850.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.659.092.925,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 95,58%.
- Keluaran : Jumlah peserta didik yang mengikuti lomba/olimpiade prestasi akademik dan non akademik
Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa akademik dan non akademik
- Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 4,42% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- d. Penyelenggaraan DAK Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 221.551.228.000,00 terealisasi sebesar Rp.213.639.760.434,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 96,43%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA yang mendapatkan Bantuan DAK untuk pemenuhan sarana prasarana
- Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)

- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 3,57% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan DAK Pendidikan Sekolah Menengah Atas telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- e. Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo
Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 9.193.692.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.522.429.901,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 81,82%.
- Keluaran : Jumlah peserta didik yang memiliki bakat istimewa
- Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 18,18% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.
- f. Manajemen Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 27.975.717.500,00 terealisasi sebesar Rp.25.966.100.149,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 92,82%.
- Keluaran : Jumlah lembaga yang bekerjasama sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri
- Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 7,18% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Manajemen Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- g. Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 522.850.230.000,00 terealisasi sebesar Rp.494.630.983.397,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 94,60%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Menengah Atas
- Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 5,40% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Bantuan

Operasional Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Atas telah berjalan dengan lancar dan efektif.

21. Program Pendidikan Menengah Kejuruan

a. Mutu dan Relevansi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 2.403.208.578,00 terealisasi sebesar Rp.2.354.054.050,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 97,95%.

Keluaran : Jumlah lembaga yang mendapatkan standart nasional pendidikan SMK yang bermutu

Jumlah lembaga yang mendapatkan standart nasional pendidikan SMK yang bermutu

Persentase kepatuhan siswa terhadap tata tertib sekolah

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 2,05% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 548.665.320.000,00 terealisasi sebesar Rp.521.601.497.233,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 95,07%.

Keluaran : Jumlah siswa SMK yang mendapatkan bantuan operasional sekolah

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 4,93% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK telah berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Manajemen Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 2.866.822.804,00 terealisasi sebesar Rp.2.637.080.338,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 91,99%.

Keluaran : Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Metode Pembelajaran Teaching Factory (TEFA)

Jumlah peserta kegiatan yang dikembangkan dan diseleraskan kualitas SMK dengan Industri

Jumlah lembaga yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Dunia Industri

Jumlah sekolah yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1

Jumlah sekolah yang memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK)

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi sebesar 8,01% realisasi anggaran sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Manajemen Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

d. Mutu Prestasi Peserta Didik SMK

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.5.027.389.046,00 terealisasi sebesar Rp.4.754.353.430,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 94,57%.

Keluaran : Jumlah Peserta didik yang mengikuti lomba/olimpiade prestasi akademik dan non akademik sesuai dengan bidang dan keahliannya
Jumlah siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa akademik dan non akademik

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 5,43% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Mutu Prestasi Peserta Didik SMK telah berjalan dengan lancar dan efektif.

e. Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.51.387.705.000,00 terealisasi sebesar Rp.50.284.598.096,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 97,85%.

Keluaran : Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana
Jumlah peserta kegiatan yang mendapatkan pelatihan pengelolaan sarana prasarana pendidikan

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran

sebesar 2,15% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

f. Penyelenggaraan DAK Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 233.033.026.000,00 terealisasi sebesar Rp.230.160.778.557,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,77%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan bantuan DAK untuk pemenuhan sarana dan prasarana

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,23% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan DAK Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

22. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan

a. Pengembangan Metode Belajar Mengajar Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 506.250.000,00 terealisasi sebesar Rp.504.471.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,65%.

Keluaran : Jumlah guru yang memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan metode pembelajaran

Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,35% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pengembangan Metode Belajar Mengajar Menggunakan Teknologi informasi dan Komunikasi telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Penyebarluasan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 1.587.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.583.446.746,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,65%.

- Keluaran : Jumlah guru dan siswa yang mendapatkan akses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan
- Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,35% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyebarluasan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TKIP)
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 156.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 155.580.289,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,57%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,43% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TKIP) telah berjalan dengan lancar dan efektif.

23. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Probolinggo
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 525.664.338,00 terealisasi sebesar Rp.524.986.454,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,87%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,13% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/ Kota Probolinggo telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Probolinggo
- Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 9.680.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.680.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten/ Kota Probolinggo telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/ Kota Probolinggo
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 9.020.000,00 terealisasi sebesar Rp. 9.013.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,92%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 21,74% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Blitar telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Probolinggo
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 24.570.270.000,00 terealisasi sebesar Rp.24.569.530.414,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,99%.
- Keluaran : Jumlah Siswa yang mendapatkan BPOPP
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,01% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Probolinggo telah berjalan dengan lancar dan efektif.

24. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 537.290.468,00 terealisasi sebesar Rp.535.568.270,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,68%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,32% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.000.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.6.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.970.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,68%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan bimbingan teknis

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,32% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan

Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 44.555.805.000,00 terealisasi sebesar Rp. 41.120.313.938,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 92,29%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 7,71% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

25. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 514.081.500,00 terealisasi sebesar Rp. 508.463.623,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,91%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,19% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo telah berjalan dengan lancar dan efektif.

- b. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 34.102.980,00 terealisasi sebesar Rp. 33.521.880,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 98,30%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,70% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 2.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.415.400,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 70,77%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 29,23% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum+ efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo berjalan dengan lancar namun belum efektif.
- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 23.087.475.000,00 terealisasi sebesar Rp. 20.703.765.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 89,68%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 10,32% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo telah berjalan dengan lancar dan efektif.

26. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi
- Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 458.498.585,00 terealisasi sebesar Rp. 458.054.639,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,90%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,10% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Banyuwangi
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 31.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 31.500.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,68%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,32% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Banyuwangi telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Banyuwangi
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 37.840.000,00 terealisasi sebesar Rp. 37.840.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Banyuwangi telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Banyuwangi
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 23.868.945.000,00 terealisasi sebesar Rp.

22.266.250.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 93,29%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 6,71% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Banyuwangi telah berjalan dengan lancar dan efektif.

27. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan

a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangkalan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 482.841.524,00 terealisasi sebesar Rp. 479.667.425,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,34%.

Keluaran : Jumlah dokumen

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,66% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangkalan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bangkalan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 34.400.000,00 terealisasi sebesar Rp. 34.264.500,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,61%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,39% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Bangkalan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bangkalan

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp.1.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.990.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,00%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 1,00% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bangkalan telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bangkalan
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 13.338.225.000,00 terealisasi sebesar Rp. 11.301.002.800,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 84,73%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 15,27% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bangkalan telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

28. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sampang
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 486.093.216,00 terealisasi sebesar Rp. 482.137.650,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,19%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,91% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sampang telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sampang
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 39.150.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.069.250,00

sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,79%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,21% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sampang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sampang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp.2.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 100%.

Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, tidak terdapat deviasi realisasi anggaran sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sampang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sampang

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 6.805.890.000,00 terealisasi sebesar Rp. 5.924.070.000,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 87,04%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 12,96% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sampang telah berjalan dengan lancar dan efektif.

29. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan

a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pamekasan

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 481.653.345,00 terealisasi sebesar Rp. 477.584.173,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 99,16%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,84 sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pamekasan telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Pamekasan
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 76.196.000,00 terealisasi sebesar Rp. 66.850.110,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 87,73%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 12,27% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Pamekasan telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Pamekasan
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 2.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.0,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 0%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 100% sehingga dapat dikatakan kegiatan tidak efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Pamekasan tidak berjalan dengan lancar dan tidak efektif.
- d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Pamekasan
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 8.076.510.000,00 terealisasi sebesar Rp.

7.133.993.099,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 88,33%.

Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP

Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 11,67% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Pamekasan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

30. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep

- a. Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumenep
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 602.172.576,00 terealisasi sebesar Rp. 601.602.267,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 99,91%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,09% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumenep telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sumenep
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 79.600.000,00 terealisasi sebesar Rp. 79.420.000,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 99,77%.
- Keluaran : Jumlah Lembaga SMA dan PK-PLK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,23% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sumenep telah berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sumenep
- Indikator Kinerja :
- Masukan : Dana Rp. 25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.25.000.000,00

sehingga tingkat capaian kerjanya 100%.

- Keluaran : Jumlah Lembaga SMK yang mendapatkan pelayanan pendidikan
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, tidak terdapat deviasi realisasi anggaran sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sumenep telah berjalan dengan lancar dan efektif.

d. Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sumenep

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 8.248.545.000,00 terealisasi sebesar Rp.7.430.210.000,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 90,08%.
- Keluaran : Jumlah siswa yang mendapatkan BPOPP
- Hasil : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 9,92% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sumenep telah berjalan dengan lancar dan efektif.

31. Program penyelenggaraan Tugas Pembantuan

a. Tugas pembantuan bidang pendidikan paud, pendidikan dasar, serta fungsi penyelenggara bantuan

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 1.285.817.000,00 terealisasi sebesar Rp. 996.038.755,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 77,46%.
- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Rata-rata lama sekolah
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 22,54% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Tugas pembantuan bidang pendidikan paud, pendidikan dasar, serta fungsi penyelenggara bantuan telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

b. Tugas Pembantuan bidang pendidikan masyarakat dan kesetaraan

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 1.723.347.568,00 terealisasi sebesar Rp. 654.598.715,00

sehingga tingkat capaian kerjanya 37,98%.

- Keluaran : Jumlah dokumen
- Hasil : Rata-rata lama sekolah
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 62,02% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Tugas Pembantuan bidang pendidikan masyarakat dan kesetaraan telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

32. Program Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan

a. Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp.247.598.385.500,00 terealisasi sebesar Rp.247.037.574.770,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 99,77%.
- Keluaran : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan peningkatan penghasilan
- Hasil : Persentase peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 0,23% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

b. Pendidikan Lanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 3.630.800.000,00 terealisasi sebesar Rp.3.338.127.559,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 91,94%.
- Keluaran : Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB berkualifikasi S1/D4
Persentase Guru SMA, SMK dan PK-PLK yang bersertifikasi profesi
Jumlah Guru SMA, SMK dan PK-PLK yang berkualifikasi S2 dan bersertifikasi profesi guru
- Hasil : Persentase peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus-Pendidikan

Layanan Khusus

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 8,06% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Pendidikan Lanjutan Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

c. Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 3.869.438.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.560.250.755,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 92,01%.

Keluaran : Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA, SMK dan SLB yang ditingkatkan kompetensi SDM dan kerjanya
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA, SMK, dan PK-PLK yang mendapatkan peningkatan kompetensi

Hasil : Persentase peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 7,99% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan berjalan dengan lancar dan efektif.

d. Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan berprestasi dan berdedikasi

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp. 171.200.000,00 terealisasi sebesar Rp. 80.401.993,00 sehingga tingkat capaian kerjanya 46,96%.

Keluaran : Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang berprestasi dan berdedikasi tingkat Nasional dan Internasional
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti kegiatan berprestasi dan berdedikasi

Hasil : Persentase peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus

Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 53,04% sehingga dapat dikatakan kegiatan belum efisien.

Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan berprestasi dan berdedikasi telah berjalan dengan lancar namun belum efektif.

e. Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 6.386.112.040,00 terealisasi sebesar Rp.5.504.703.004,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 86,20%.
- Keluaran : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan layanan manajemen karir
- Hasil : Persentase peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 13,80% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

f. Perlindungan Profesi guru dan tenaga kependidikan

Indikator Kinerja :

- Masukan : Dana Rp. 232.310.000,00 terealisasi sebesar Rp. 216.760.267,00 sehingga tingkat capaian kinerjanya 93,31%.
- Keluaran : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan hukum
- Hasil : Persentase peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus
- Efisiensi : Berdasarkan capaian kinerja, terdapat deviasi realisasi anggaran sebesar 6,69% sehingga dapat dikatakan kegiatan telah efisien.
- Efektivitas : Berdasarkan capaian kinerja, kegiatan Perlindungan Profesi guru dan tenaga kependidikan telah berjalan dengan lancar dan efektif.

1.3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 terdapat beberapa hambatan dan kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan maksimal, diantaranya adalah :

1. Selisih perencanaan dalam 1 (satu) tahun anggaran atas belanja rutin yang pembayarannya disesuaikan dengan tagihan bulanan;

2. Adanya ketergantungan realisasi terhadap tingkat kehadiran peserta dalam satu kegiatan, dengan rata – rata kehadiran peserta tercapai antara 85% - 90%;
3. Selisih bukti perjalanan dinas dan transport yang dibayarkan sesuai *ad cost* (real) dibandingkan dengan perencanaan anggaran;
4. Pembangunan RKB SMAN 1 Ponorogo tidak terealisasi dikarenakan waktu pelaksanaan yang pendek serta terdapat nilai sisa lelang;
5. Adanya belanja yang dialokasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan namun pada tahun anggaran berjalan pelaksanaannya tidak sesuai dengan kebutuhan/realitas lapangan seperti pada belanja BOS dan Tambahan Penghasilan Guru.

1.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1.4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah terdapat 2 (dua) entitas penyelenggara yaitu :

- a. **Entitas pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih unit pemerintahan yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, adapun entitas pelaporan yaitu pemerintahan daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan dan entitas pelaporan yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. **Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu entitas akuntansi yang berada dilingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Adapun Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terdiri dari :

1. **Laporan Realisasi APBD**

Laporan Realisasi APBD terdiri dari Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/defisit dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA Dinas Pendidikan Prov. Jatim disusun dengan menggunakan Sistem Akuntansi berbasis Kas.

- Angka Realisasi Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2020 berdasarkan semua aliran kas masuk berupa penerimaan pada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan Prov. Jatim yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- Angka Realisasi Belanja Daerah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2019 berdasarkan semua aliran kas keluar berupa pengeluaran dari Rekening Bendahara Pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
- Angka Realisasi Pembiayaan pada Dinas Pendidikan Prov. Jatim tidak disajikan.

2. Laporan Operasional

Menurut paragraf 78 kerangka konseptual SAP adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Pelaporan ini disusun berdasarkan basis akrual.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan dalam paragraf 79 kerangka konseptual SAP sebagai berikut:

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pada Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jatim tidak terdapat transfer sehingga tidak disajikan.
- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Pada Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jatim tidak disajikan.

3. Neraca

Neraca Dinas Pendidikan Prov. Jatim disusun berdasarkan data kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu dan setara kas lainnya, data aset dan persediaan selama tahun 2020, dan data kewajiban yang terjadi pada tahun 2020. Neraca yang disajikan pada laporan keuangan bertujuan untuk menunjukkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode 31 Desember 2020.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK) dalam rangka pengungkapan yang memadai.

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh

entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini berdasarkan Paragraf 101 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

1.4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 tahun 2017 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun rincian basis akuntansi yang digunakan pada tiap elemen pelaporan adalah sebagai berikut :

- Laporan Realisasi APBD disusun dengan menggunakan Basis Kas Yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- Laporan Operasional dan neraca disusun dengan menggunakan Basis Akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1.4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diakui pada saat diterimanya kas oleh bendahara penerimaan. Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan harus disetor ke rekening kas umum daerah pada hari yang sama.

2. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi

perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Belanja terdiri atas :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan

Pencatatan belanja adalah sebesar nilai brutonya. Jika terdapat potongan pajak dari BUD, belanja tetap dicatat sebesar nilai bruto dan pengakuan potongan pajak terdapat di BUD. Jika terdapat potongan pajak di OPD, belanja tetap dicatat sebesar nilai bruto dan terdapat penjurnalan potongan pajak di OPD.

b. Belanja Barang dan Jasa

Pengakuan Belanja Barang dan Jasa adalah pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembelian dan pembayaran. Jika terdapat pungutan pajak dan dipungut oleh OPD maka dicatat sebagai hutang oleh OPD.

c. Belanja Modal

Pencatatan pada rekening - rekening buku besar belanja modal dimulai sejak bendahara pengeluaran merealisasikan belanja modal hingga penutupan tahun anggaran.

3. Pendapatan dalam Laporan Operasional

Pendapatan dalam Laporan Operasional Dinas Pendidikan Prov. Jatim diakui pada saat terjadinya transaksi. Yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau sesuai dengan Surat Perjanjian.

4. Beban

Beban dalam Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur diakui pada saat terjadinya transaksi. Yaitu pada saat terbitnya Berita Acara Penyerahan Pekerjaan untuk pengadaan jasa dan Berita Acara Penerimaan barang untuk pengadaan barang.

6. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset di klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Pengertian Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun. Terdiri dari :

- **Kas dan setara kas**
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- **Piutang**
Piutang adalah tagihan kepada pihak ke tiga yang akan diterima pembayarannya pada masa yang akan datang dalam kurun waktu 12 bulan. Piutang dinilai berdasarkan nilai nominal yang akan diterima pada tanggal jatuh tempo.
- **Persediaan**
Persediaan adalah barang- barang yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam operasional pemerintahan atau diserahkan/ dijual kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. **Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu :

- **Investasi Non Permanen**
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.
- **Investasi Permanen**
Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah atau Badan Hukum Lainnya.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari :

- **Tanah** yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau masyarakat umum dan dalam kondisi siap pakai. Tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, jaringan, irigasi tetap dicatat sebagai tanah yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatas tanah tersebut.
- **Peralatan dan Mesin** yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah atau masyarakat umum dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap yang dapat diklarifikasikan dalam peralatan dan mesin ini mencakup antara lain : alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi, dan pemancar, alat laboratorium, alat kesehatan, komputer dll.
- **Gedung dan Bangunan** yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah Gedung dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau masyarakat umum dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam jenis gedung dan bangunan antara lain : Bangunan gedung, monumen, bangunan menara dll.
- **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- **Aset Tetap lainnya** merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tetap di atas, tetapi memenuhi definisi aset tetap. Aset tetap lainnya ini meliputi buku perpustakaan dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.
- **Konstruksi dalam Pengerjaan** mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dibangun seluruhnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran Rumah, Tagihan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain dan atau mutasi dari aset tetap yang telah diinventarisir untuk dahapuskan karena aset tersebut secara fisik sudah tidak dapat dioperasionalkan. Aset lainnya terdiri dari :

- **Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- **Tagihan Ganti Rugi (TGR)** merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- **Kemitraan dengan pihak ketiga** merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- **Aset Tak Berwujud** merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan :

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. **Ekuitas**

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

1.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Sistem akuntansi pemerintah daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah menegaskan bahwa Laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Penerapan kebijakan akuntansi pemerintah sesuai dengan SAP adalah sebagai berikut :

- **Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan** yaitu dengan mengakui pendapatan pada saat kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah . perlakuan terhadap koreksi atas transaksi pendapatan juga telah sesuai dengan SAP.

- **Penerapan kebijakan akuntansi belanja** yaitu belanja diakui ketika terjadi pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran dan pertanggungjawaban telah disahkan oleh pihak yang berwenang.
- **Penerapan kebijakan akuntansi atas belanja modal** yaitu Belanja modal diakui berdasarkan prinsip harga perolehan dan pada saat yang sama diakui menambah aset tetap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

1.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1.5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan

1.5.1.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar Sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonversi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Tabel 5-5 Rekapitulasi LRA TA 2020

No	Uraian	2020			2019
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	375.000.000,00	1.470.936.639,80	392,25	1.660.137.119,75
2	BELANJA DAERAH	6.367.322.025.746,45	6.175.248.359.372,80	96,98	6.150.028.543.588,05
SURPLUS / (DEFISIT)		(6.366.947.025.746,45)	(6.173.777.422.733,00)	96,97	(6.148.368.406.468,30)

1.5.1.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.470.936.639,80** apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar **Rp.375.000.000,00** terdapat persentase sebesar **392,25%**. sedangkan Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.1.660.137.119,75** apabila dihadapkan dengan target pendapatan sebesar **Rp.200.000.000,00** atau sebesar **830,07%**, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5-6 Pendapatan Daerah TA 2018

No.	Uraian	Realisasi 2020			Realisasi 2019
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	
1	RETRIBUSI DAERAH	30.000.000,00	16.100.000,00	(13.900.000,00)	86.240.000,00
2	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	345.000.000,00	1.454.836.639,80	1.109.836.639,80	1.573.897.119,75
JUMLAH PENDAPATAN		375.000.000,00	1.470.936.639,8	1.460.137.119,75	1.660.137.119,75

1.5.1.1.1.1. Retribusi Daerah

Tabel 5-7 Retribusi Daerah TA 2019

No.	Uraian	Realisasi 2020			Realisasi 2019
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.000.000,00	16.100.000,00	(13.900.000,00)	86.240.000,00
JUMLAH RETRIBUSI DAERAH		100.000.000,00	86.240.000,00	(13.760.000,00)	86.240.000,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2020 Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp.16.100.000,00 dari anggaran sebesar Rp.30.000.000,00 atau 53,67%. Realisasi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.70.140.000,00 atau 81,33% dibandingkan dengan tahun 2019.

Sumber Retribusi Daerah tahun 2020 berasal dari Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebesar Rp.86.240.000,00 dengan rincian perolehan dari :

Tabel 5-8 Rincian Realisasi Retribusi Daerah

No	Uraian	TA 2020	TA 2019
1.	Sewa gedung dan halaman Taruna Loka Claket	600.000,00	20.800.000,00
2.	Sewa Asrama Jagir	15.500.000,00	65.440.000,00
JUMLAH		16.100.000,00	86.240.000,00

Penyebab tidak tercapainya target Retribusi Daerah antara lain karena adanya pandemi COVID-19 yang berimbas pada tidak adanya penyewa obyek retribusi selama bulan April – Desember 2020.

1.5.1.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tabel 5-9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah TA 2020

No.	Uraian	Realisasi 2020			Realisasi 2019
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	15.685.900,00	15.685.900,00	728.297.978,00
2	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.117.500.739,80	1.117.500.739,80	786.770.141,75
4	Pendapatan Sewa	345.000.000,00	321.650.000,00	(23.350.000,00)	58.800.000,00
5	Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	29.000,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH		345.000.000,00	1.454.836.639,80	1.109.836.639,80	1.573.897.119,75

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada 2020 adalah sebesar Rp.1.454.836.639,80 atau mencapai 421,69% dari target setelah perubahan sebesar Rp.345.000.000,00.

Adapun rincian lebih lanjut atas Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Merupakan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan sebesar Rp.15.685.900,00 atas Pekerjaan :
 - a. Denda keterlambatan pembangunan kolam renang SMAN 3 Taruna Angkasa Jatim Prov. Jatim sebesar Rp.1.982.000,00;
 - b. Denda keterlambatan pembangunan ruang makan SMAN 3 Taruna Angkasa Jatim Prov. Jatim sebesar Rp.2.525.000,00;
 - c. Denda keterlambatan pembangunan asrama SMAN 3 Taruna Angkasa Jatim Prov. Jatim sebesar Rp.11.178.900,00;
2. Pendapatan dari Pengembalian
Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2020 sebesar Rp. 1.117.500.739,80 dengan rincian :

Tabel 5-10 Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	823.994.412,00
2.	Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	8.077.376,50
3.	Pendapatan dari pengembalian Pembayaran Belanja	285.428.951,30
	JUMLAH	1.117.500.739,80

3. Pendapatan Sewa
Realisasi dari pendapatan sewa sebesar Rp. 321.650.000,00 diperoleh dari :

Tabel 5-11 Rincian Realisasi Pendapatan Sewa

No	Uraian	Jumlah
1.	Sewa Rumah Dinas	29.350.000,00
2.	Sewa Ruang oleh Koperasi Handayani	8.250.000,00
3.	Sewa Kantin Taruna Loka Ds Claket Kec Pacet Kab Mojokerto	2.000.000,00
4.	Sewa Stand Toko oleh Koperasi Karya Makmur	3.000.000,00
5.	Sewa Ruang Kantin oleh Dharma Wanita	2.250.000,00
6.	Sewa Tanah oleh PT. Oxcy Jaya Putra	275.000.000,00
7.	Sewa Gedung oleh TK Liya dan PAUD Liya Jl Walikota Mustajab dan Cipunegara	1.800.000,00
	JUMLAH	321.650.000,00

1.5.1.1.2. Penjelasan Pos - Pos Belanja

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.6.175.248.359.372,80** apabila Realisasi Belanja dihadapkan dengan anggaran sebesar **Rp. 6.367.322.025.746,45** atau terealisasi **96,98%**. Belanja Daerah terdiri dari :

Tabel 5-12 Belanja TA 2020

Uraian	2020			2019
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	Realisasi
Belanja Operasional	5.859.331.528.788,45	5.696.902.585.366,80	(162.428.943.421,65)	5.514.526.939.344,05
Belanja Modal	507.990.496.958,00	478.345.774.006,00	(29.644.722.952,00)	635.501.604.244,00
Total Belanja Daerah	6.367.322.025.746,45	6.175.248.359.372,80	(192.073.666.373,65)	6.150.028.543.588,05

1.5.1.1.2.1. Belanja Operasional

Realisasi Belanja Operasional 2020 adalah sebesar Rp.5.696.902.585.366,80 atau 97,23% dari anggaran Rp.5.859.331.528.788,45. Kenaikan realisasi belanja tahun anggaran 2020 dibandingkan dengan tahun anggaran 2019 berasal dari penurunan Belanja Pegawai sebesar 1,41% dan kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar 15,39%. Rincian Belanja Operasional terdiri dari:

Tabel 5-13 Belanja Operasional TA 2020

Uraian	2020			2019
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	Realisasi
Belanja Pegawai	3.949.620.295.511,72	3.911.483.613.786,00	(38.136.681.725,72)	3.967.300.634.353,71
Belanja Barang dan Jasa	1.909.711.233.276,73	1.785.418.971.580,80	(124.292.261.695,93)	1.547.226.304.990,34
Total Belanja Operasional	5.859.331.528.788,45	5.696.902.585.366,80	(162.428.943.421,65)	5.514.526.939.344,05

1.5.1.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2020 adalah sebesar Rp.3.911.483.613.786,00 atau 99,03% dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 3.949.620.295.511,72. Penurunan realisasi Belanja Pegawai tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 berasal dari :

1. Penurunan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.121.522.356.460,54 atau 3,45;
2. Penurunan Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.14.632.198.090,17 atau 10,60%;
3. Penurunan Honorarium PNS sebesar Rp.73.899.360,00 atau 3,25%;
4. Kenaikan Honorarium Non PNS sebesar Rp.42.003.486.200,00 atau 18,89%;

5. Kenaikan Belanja Pegawai BOS sebesar Rp.38.407.947.143,00 atau 44,27%.

Tabel 5-14 Belanja Pegawai TA 2020

Uraian	2020			2019
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	Realisasi
Gaji dan Tunjangan	3.420.089.672.011,72	3.396.260.441.503,00	(23.829.230.508,72)	3.517.782.797.963,54
Tambahan Penghasilan PNS	135.920.750.000,00	123.442.778.413,00	(12.477.971.587,00)	138.074.976.503,17
Honorarium PNS	2.509.806.300,00	2.197.288.140,00	(312.518.160,00)	2.271.187.500,00
Honorarium Non PNS	265.454.747.200,00	264.418.593.700,00	(1.036.153.500,00)	222.415.107.500,00
Belanja Pegawai BOS	125.645.320.000,00	125.164.512.030,00	(480.807.970,00)	86.756.564.887,00
Total Belanja Pegawai	3.949.620.295.511,72	3.911.483.613.786,00	(38.136.681.725,72)	3.967.300.634.353,71

Secara keseluruhan realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 telah memenuhi target.

1.5.1.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar **Rp.1.785.418.971.580,80** atau **93,49%** dari anggaran setelah perubahan sebesar **Rp.1.909.711.233.276,73**. Kenaikan realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang signifikan berasal dari :

1. Kenaikan Belanja Sewa Alat Berat/Peralatan sebesar 1,62%;
2. Kenaikan Belanja Pakaian Khusus dan Hari – hari tertentu sebesar 26,01%;
3. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS/Non PNS pada tahun 2019 tidak ada, namun pada tahun 2020 ada sebesar Rp.1.600.000.000,00;
4. Kenaikan Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis sebesar 138,16%;
5. Kenaikan Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar 29,15%;
6. Kenaikan Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar 8,81%;
7. Kenaikan Belanja Bantuan Pendidikan sebesar 55,63%.

Berikut rincian Belanja Barang dan Jasa :

Tabel 5-15 Belanja Barang dan Jasa TA 2020

Uraian	2020			2019
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	Realisasi
Belanja Bahan Pakai Habis	11.373.373.942,00	10.166.275.670,00	-1.207.098.272,00	12.702.121.704,00

Uraian	2020			2019
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	Realisasi
Belanja				
Bahan/Material	2.178.207.046,00	2.169.306.315,00	-8.900.731,00	3.537.663.070,00
Belanja Jasa	60.601.471.161,00	52.514.808.691,00	-8.086.662.470,00	90.346.011.366,00
Belanja Premi, Luran, Asuransi, dan Pemeriksaan Kesehatan	297.480.000,00	291.805.000,00	-5.675.000,00	308.217.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	688.114.820,00	659.693.563,00	-28.421.257,00	911.879.596,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.808.114.707,00	2.706.861.846,00	-101.252.861,00	4.645.623.926,00
Belanja Sewa Tanah/Jalan/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	72.500.000,00	56.625.000,00	-15.875.000,00	1.056.031.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	108.300.000,00	103.226.000,00	-5.074.000,00	424.738.600,00
Belanja Sewa Alat Berat/Peralatan	66.000.000,00	65.670.000,00	-330.000,00	64.625.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.286.100.000,00	1.269.119.500,00	-16.980.500,00	1.967.378.545,00
Belanja Makanan dan Minuman	12.166.517.700,00	9.153.578.443,00	-3.012.939.257,00	20.903.521.754,00
Belanja Pakaian dan Atributnya	686.240.000,00	648.639.490,00	-37.600.510,00	949.580.170,00
Belanja Pakaian Kerja	119.500.000,00	118.846.200,00	-653.800,00	985.074.200,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.181.254.000,00	1.143.732.800,00	-37.521.200,00	907.657.950,00
Belanja Perjalanan Dinas	21.412.364.986,00	17.712.603.272,00	-3.699.761.714,00	35.288.053.077,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS/Non PNS	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisai, dan Bimbingan Teknis	1.752.178.400,00	752.148.400,00	-1.000.030.000,00	315.813.400,00
Belanja Pemeliharaan	74.682.020.324,00	73.507.929.114,00	-1.174.091.210,00	92.421.585.991,60
Belanja Jasa Konsultasi	19.100.000.000,00	19.061.019.225,00	-38.980.775,00	28.995.188.520,00
Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pemenang perlombaan/Kompetisi/Kejuaraan	2.216.800.000,00	2.181.565.760,00	-35.234.240,00	2.580.556.120,00
Belanja Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	187.703.931.292,00	183.968.386.903,00	-3.735.544.389,00	142.448.458.290,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	764.497.909.898,73	731.807.887.028,00	-32.690.022.870,73	672.531.859.038,27

Uraian	2020			2019
	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/(kurang)	Realisasi
Belanja Bantuan Pendidikan	743.112.855.000,00	673.759.243.360,80	-69.353.611.639,20	432.934.666.672,47
Total Belanja Barang dan Jasa	1.909.711.233.276,73	1.785.418.971.580,80	-124.292.261.695,93	1.547.226.304.990,34

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rata – rata capaian realisasi per jenis belanja barang dan jasa telah mencapai diatas 85%, namun terdapat pula yang dibawah 85%, karena :

1. Belanja sewa Tanah/Jalan/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir terealisasi sebesar Rp.56.625.000,00 atau 78,10% dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan sewa gedung untuk kegiatan, dan banyaknya kegiatan serta rapat yang diselenggarakan secara daring akibat pandemi;
2. Belanja Makanan dan Minuman terealisasi sebesar Rp.9.153.578.443,00 atau 75,24% dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah peserta dalam kegiatan dan rapat, serta banyaknya kegiatan serta rapat yang diselenggarakan secara daring akibat pandemic sehingga berpengaruh terhadap realisasi;
3. Belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp.17.712.603.272,00 atau 82,72% dikarenakan penyesuaian dengan kebutuhan atas kegiatan dan pelaksanaan sesuai bukti riil perjalanan, serta banyaknya kegiatan serta rapat yang diselenggarakan secara daring akibat pandemic sehingga berpengaruh terhadap realisasi terutama terhadap perjalanan dinas luar daerah;
4. Belanja kursus pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis terealisasi sebesar Rp.752,148.400,00 atau 42,93% dikarenakan menyesuaikan jumlah peserta yang mengikuti kursus.

1.5.1.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 478.345.774.006,00** atau **94,16%** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp. 507.990.496.958,00**. Bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 realisasi sebesar **Rp. 635.501.604.244,00** atau **84,19%**. Besarnya realisasi belanja modal adalah sebagai berikut :

Tabel 5-16 Belanja Modal TA 2019

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp.	Lebih/(kurang)	
Belanja Tanah	150.000.000,00	67.720.000,00	-82.280.000,00	3.059.803.835,00
Belanja Peralatan dan Mesin	231.196.991.300,00	227.558.957.352,00	-3.638.033.948,00	410.515.574.728,00
Belanja Gedung dan Bangunan	155.613.401.658,00	150.544.868.370,00	-5.068.533.288,00	92.191.742.833,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	295.982.100,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	119.253.304.000,00	98.459.082.984,00	-20.794.221.016,00	127.248.985.233,00

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2020		Realisasi 2019
		Rp.	Lebih/(kurang)	
Belanja Aset Lainnya	1.776.800.000,00	1.715.145.300,00	-61.654.700,00	2.189.515.515,00
Jumlah Belanja Modal	507.990.496.958,00	478.345.774.006,00	-29.644.722.952,00	635.501.604.244,00

Berdasarkan tabel diatas, secara total realisasi belanja modal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah diatas 85%. Namun adapula belanja modal yang terealisasi kurang dari 85% dikarenakan:

1. Realisasi Belanja Tanah sebesar Rp.67.720.000,00 atau 45,15% dikarenakan untuk Pematangan Lahan (pengurukan) SMK Negeri Maritim Kab. Lamongan baru tahap perencanaan 80%;
2. Realisasi Belanja Aset Tetap lainnya sebesar Rp.98.459.082.984,00 atau 82,56% dikarenakan untuk realisasi belanja aset tetap lainnya yang berasal dari dana BOS menyesuaikan RKAS yang sesuai dengan kebutuhan belanja modal aset pada lembaga sekolah penerima BOS.

1.5.1.1.3. Penjelasan pos-pos pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

1.5.1.2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Laporan Operasional yang dihasilkan berisi komponen Pendapatan-LO dan beban. Laporan Operasional disajikan sebagai berikut :

Jumlah Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.344.686.639,84**. Sedangkan **Jumlah Beban Operasi** pada Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.5.928.419.999.591,80**. Sehingga terdapat Defisit – LO adalah sebesar **Rp.5.927.546.750.337,96**.

1.5.1.2.1. Penjelasan Pendapatan – LO

Jumlah Pendapatan – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.344.686.639,84** sedangkan pada tahun 2019 sebesar **Rp.1.773.470.453,28** dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-17 Rincian Pendapatan - LO

Nomor Urut	Uraian	2020	2019
1.1	Pendapatan Asli Daerah - LO	1.344.686.639,84	1.773.470.453,28
JUMLAH PENDAPATAN – LO		1.344.686.639,84	1.773.470.453,28

1.5.1.2.1.1. Pendapatan asli Daerah (PAD) – LO

Jumlah Pendapatan – LO pada Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp.1.344.686.639,84** sedangkan pada tahun 2019 sebesar **Rp. 1.773.470.453,28** dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-18 Rincian Pendapatan - LO

Nomor Urut	Uraian	2020	2019
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	1.344.686.639,84	1.773.470.453,28
JUMLAH PENDAPATAN – LO		1.344.686.639,84	1.773.470.453,28

1.5.1.2.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Retribusi Daerah selama tahun 2020 direalisasikan sebesar Rp.16.100.000,00 mengalami penurunan sebesar 81,33% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.86.240.000,00.

Tabel 5-19 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Nomor Urut	Uraian	2020	2019
1.	Retribusi Jasa Usaha-LO	16.100.000,00	86.240.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO		16.100.000,00	86.240.000,00

Retribusi Jasa Usaha – LO tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur meliputi :

Tabel 5-20 Rincian Retribusi Jasa Usaha – LO

No	Uraian	TA 2019
1.	Sewa gedung dan halaman Taruna Loka Claket Januari – Desember 2019	600.000,00
2.	Sewa Asrama Jagir bulan Januari – Desember 2020	15.500.000,00
	JUMLAH	16.100.000,00

1.5.1.2.1.1.2. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Pada tahun 2020 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO terealisasi sebesar Rp.1.328.586.639,84, turun sebesar 21,26% dari tahun 2019 sebesar Rp.1.687.230.453,28 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-21 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Nomor Urut	Uraian	2020	2019
1.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	15.685.900,00	728.297.978,00
2.	Pendapatan dari Pengembalian	1.117.500.739,80	786.770.141,75
3.	Pendapatan Sewa	195.400.000,04	172.133.333,53
4.	Penerimaan lain – lain	0,00	29.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.328.586.639,84	1.687.230.453,28

Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. **1.328.586.639,84,84**, terdiri dari :

1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Merupakan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan sebesar Rp.15.685.900,00 atas Pekerjaan :
 - a. Denda keterlambatan pembangunan kolam renang SMAN 3 Taruna Angkasa Jatim Prov. Jatim CV. Catur Putra Utama sebesar Rp.1.982.000,00;
 - b. Denda keterlambatan pembangunan Ruang Makan SMAN 3 Taruna Angkasa Jatim sebesar Rp.2.525.000,00;
 - c. Denda keterlambatan pembangunan Asrama SMAN 3 Taruna Angkasa Jatim CV. Noz Sebelas sebesar Rp.11.178.900,00.
2. Pendapatan dari Pengembalian
Merupakan Pendapatan dari Pengembalian tahun 2020 sebesar Rp.1.117.500.739,80 dengan rincian :

Tabel 5-22 Rincian Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	823.994.412,00
2.	Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	8.077.376,50
3.	Pendapatan dari pengembalian Pembayaran Belanja	285.428.951,30
	JUMLAH	1.117.500.739,80

3. Pendapatan Sewa

Realisasi dari pendapatan sewa sebesar Rp.195.400.000,04 diperoleh dari :

Tabel 5-23 Rincian Realisasi Pendapatan Sewa

No	Uraian	Jumlah
1.	Sewa Rumah Dinas	29.350.00000
2.	Sewa Ruang oleh Koperasi Handayani	8.250.000,00
3.	Sewa Kantin Taruna Loka Ds Claket Kec Pacet Kab Mojokerto	2.000.000,00
4.	Sewa Stand Toko oleh Koperasi Karya Makmur	3.000.000,00
5.	Sewa Ruang Kantin oleh Dharma Wanita	2.250.000,00
6.	Sea Gedung oleh TK Liya dan PAUD Liya Jalan Walikota Mustajab dan Cipunegara	1.800.000,00
7.	Pengakuan Pendapatan Sewa Lahan oleh Telkomsel untuk Menara BTS di SMAN 9 Malang April 2017 – Maret 2022 (periode 2020)	80.000.000,04
8.	Pengakuan Pendapatan Sewa Gedung dan bangunan oleh PT. Oxcy Jaya Putra untuk pemasangan papan reklame di Jl. Padmosusastro No. 53 Surabaya periode 5 September 2019 s.d 5 September 2024 (periode 2019-2020)	68.750.000,00
	JUMLAH	195.400.000,04

1.5.1.2.1.2. Penjelasan Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pada tahun 2020 beban terealisasi sebesar Rp.5.928.419.999.591,80 sedangkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.5.850.198.187.922,95 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-25 Rincian Beban

No.	Uraian	2020	2019
1.	Beban Operasi	5.928.419.999.591,80	5.850.198.187.922,95
2.	Defisit non Operasional	471.437.386,00	0,00
	Beban	5.928.891.436.977,80	5.850.198.187.922,95

1.5.1.2.1.2.1. Beban Operasi

Pada tahun 2020 beban operasi terealisasi sebesar Rp.5.928.419.999.591,80 sedangkan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp.5.850.198.187.922,95 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-26 Rincian Beban Operasi

No.	Uraian	2020	2019
1.	Beban Pegawai	3.911.483.613.786,00	3.967.300.634.353,71
2.	Beban Barang dan Jasa	1.412.043.954.441,80	1.394.669.938.149,67
3.	Beban Hibah	183.983.236.903,00	142.455.058.290,00
4.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	373.608.130.817,00	265.635.344.865,00
5.	Beban Lain-lain	47.301.063.644,00	80.137.212.264,57
	Beban Operasi	5.928.419.999.591,80	5.850.198.187.922,95

1.5.1.2.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai pada tahun 2020 sebesar Rp.3.911.483.613.786,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp.3.967.300.634.353,71 sebagaimana terinci :

Tabel 5-27 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	2020	2019
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	3.396.260.441.503,00	3.517.782.797.963,54
	• Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.727.591.061.533,90	1.776.906.881.943,96
	• Tunjangan Keluarga	160.965.185.546,40	166.895.448.602,68
	• Tunjangan Jabatan	3.664.821.000,00	3.987.253.000,00
	• Tunjangan Fungsional	137.763.073.000,00	143.459.945.054,00
	• Tunjangan Umum	8.988.530.000,00	8.916.710.667,00
	• Tunjangan Beras	74.650.922.592,70	78.003.986.370,90
	• Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	13.408.006.301,00	13.246.651.194,00
	• Pembulatan Gaji	22.454.257,00	23.712.167,00
	• Iuran Jaminan Kesehatan	69.869.080.564,00	46.007.709.473,00
	• Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian	14.200.836.348,00	14.607.905.711,00
	• Tunjangan Profesi Guru PNSD – LO	1.181.277.681.960,00	1.258.911.352.180,00
	• Tambahan Penghasilan Guru PNSD	2.535.000.000,00	3.963.000.000,00
	• Tunjangan Khusus Guru	1.323.788.400,00	2.852.241.600,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	123.442.778.413,00	138.074.976.503,17
	• Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	456.330.000,00	152.110.000,00
	• Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	53.396.362.468,00	62.994.158.552,00
	• Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya	69.590.085.945,00	74.928.707.951,17
3.	Beban Honorarium PNS	2.197.288.140,00	2.271.187.500,00
	• Honorarium Kegiatan ASN	34.200.000,00	0,00
	2. Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa ASN	174.475.000,00	202.360.000,00

No.	Uraian	2020	2019
	3. Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi ASN	1.988.613.140,00	2.068.827.500,00
4.	Beban Honorarium Non PNS	264.418.593.700,00	222.415.107.500,00
	4. Honorarium Kegiatan Non PNS	4.689.100.000,00	6.374.500.000,00
	5. Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS	358.547.200,00	347.675.000,00
	6. Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD	259.370.946.500,00	215.692.932.500,00
5.	Beban Pegawai BOS	125.164.512.030,00	86.756.564.887,00
	7. Beban Pegawai BOS	125.164.512.030,00	86.756.564.887,00
	Total Beban Pegawai – LO	3.911.483.613.786,00	3.971.349.540.300,71

1.5.1.2.1.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.412.043.954.441,80 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp.1.394.669.938.149,67 yang diperoleh dari :

Tabel 5-28 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	2020	2019
1.	Beban Bahan Pakai Habis	10.291.205.145,00	12.425.521.614,00
2.	Beban Bahan/Material	2.169.306.315,00	3.537.663.070,00
3.	Beban Jasa	52.444.417.677,00	92.999.328.480,00
4.	Beban Premi, Iuran, Asuransi, dan Pemeriksaan Kesehatan	291.805.000,00	308.217.000,00
5.	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	659.693.563,00	919.864.496,00
6.	Beban Cetak dan Penggandaan	3.118.178.356,00	4.170.940.975,50
7.	Beban Sewa Tanah/Jalan/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	56.625.000,00	1.056.031.000,00
8.	Beban Sewa Sarana Mobilitas	103.226.000,00	424.738.600,00
9.	Beban Sewa Alat Berat/Peralatan	65.670.000,00	64.625.000,00
10.	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.269.119.500,00	1.967.378.545,00
11.	Beban Makanan dan Minuman	9.153.578.443,00	20.903.521.754,00
12.	Beban Pakaian dan Atributnya	1.131.241.764,00	322.188.471,00
13.	Beban Pakaian Kerja	118.846.200,00	985.074.200,00
14.	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.149.319.920,00	907.657.950,00
15.	Beban Perjalanan Dinas	17.712.603.272,00	35.288.053.077,00
16.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS/Non PNS	1.600.000.000,00	315.813.400,00
17.	Beban Kursus, pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	752.148.400,00	0,00
18.	Beban Pemeliharaan	73.485.984.114,00	91.872.084.291,60
19.	Beban Jasa Konsultasi	19.061.019.225,00	28.995.188.520,00
20.	Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan	2.181.565.760,00	2.580.556.120,00

No.	Uraian	2020	2019
21.	Beban Barang dan Jasa BOS	723.732.711.913,00	661.690.824.913,10
22.	Beban Pendidikan Dasar dan Menengah	491.495.688.874,80	432.934.666.672,47
	Total Beban Barang dan Jasa	1.412.043.954.441,80	1.394.669.938.149,67

1.5.1.2.1.2.1.3. Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.183.983.236.903,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp.142.455.058.290,00 yang diperoleh dari :

Tabel 5-29 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	2020	2019
1.	Beban Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	183.983.236.903,00	142.455.058.290,00
	Total Beban Hibah	183.983.236.903,00	142.455.058.290,00

1.5.1.2.1.2.1.4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.265.635.344.865,00 sedangkan tahun 2019 adalah sebesar Rp.265.635.344.865,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5-30 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No.	Uraian	2020	2019
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	266.387.860.398,00	174.866.571.340,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	55.229.081.189,00	54.427.259.891,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	685.592.542,00	681.561.124,00
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	50.206.063.055,00	34.950.107.978,00
5.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.089.507.651,00	709.844.532,00
6.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	10.025.982,00	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	373.608.130.817,00	265.635.344.865,00

1.5.1.2.1.2.1.5. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul atas pencatatan belanja aset yang nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi (*extracomptable*). Beban Lain – lain tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.47.301.063.644,00 sedangkan tahun 2019 adalah sebesar Rp.80.137.212.264,57. Beban lain-lain tersebut timbul karena adanya perolehan aset tetap yang masuk ke dalam aset ekstrakomtabel.

Tabel 5-31 Rincian Beban Lain – lain

No.	Uraian	2020	2019
1.	Beban Lain – lain	47.301.063.644,00	80.137.212.264,57
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	47.301.063.644,00	80.137.212.264,57

1.5.1.2.1.2.2. Defisit Non Operasional – LO

Jumlah Defisit Non Operasional – LO pada Tahun Anggaran 2020 mengalami defisit sebesar **Rp.471.437.386,00** sedangkan pada tahun 2019 sebesar **Rp. 0,00** dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5-24 Surplus Non Operasional - LO

Nomor Urut	Uraian	2020	2019
1.	Defisit Pemindahtangan/Pemusnahan Aset Non Lancar - LO	471.437.386,00	0,00
	Jumlah Defisit non Operasional	471.437.386,00	0,00

1.5.1.3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut (dalam rupiah) :

Tabel 5-32 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset	5.120.302.304.587,75	4.827.564.540.342,83
Kewajiban	548.513.387,92	492.654.401,96
Ekuitas	5.119.753.791.199,83	4.827.071.885.940,87

1.5.1.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber – sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terbagi dalam :

Tabel 5-33 Rekapitulasi Aset per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lancar	12.835.766.626,15	41.884.231.643,23
Aset Tetap setelah penyusutan	5.099.711.636.021,60	4.778.737.855.242,60
Aset Lainnya	7.754.901.940,00	6.942.453.457,00
Aset	5.120.302.304.587,75	4.827.564.540.342,83

Berdasarkan rincian aset diatas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan aset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.292.737.764.244,92 atau 6,06%. Aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagian besar terdiri dari Aset Tetap yaitu sebesar 99,60% dari keseluruhan aset yang dimiliki.

1.5.1.3.1.1. Aset Lancar

Tabel 5-34 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas dan Setara Kas	11.953.152.998,65	39.962.332.636,73
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	882.613.627,50	1.921.899.006,50
Aset Lancar	12.835.766.626,15	41.884.231.643,23

Saldo aset lancar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.12.835.766.626,15 dan Rp.41.884.231.643,23,00.

1.5.1.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Tabel 5-35 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	11.953.152.998,65	39.962.332.636,73
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas dan Setara Kas	11.953.152.998,65	39.962.332.636,73

Saldo Kas dan Setara Kas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.11.953.152.998,65 dan Rp.39.962.332.636,73.

1.5.1.3.1.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Tabel 5-36 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0,00.

1.5.1.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tabel 5-37 Rincian Kas di Bank Bendahara Pengeluaran per 31 Desember

No. Rek	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
0011068588	Pemegang Kas Dinas Pendidikan (Rekening Bendahara Pengeluaran)	0,00	0,00
0011260535	Dispendik Bid. Pembinaan PK – PLK (Rekening BPP bidang PK – PLK)	0,00	0,00
0011260543	Dispendik Bidang PP SMA (Rekening BPP bidang SMA)	0,00	0,00
0011260551	Dispendik Bidang PP SMK (Rekening BPP bidang SMK)	0,00	0,00
0011260560	Dispendik Bidang Pembinaan GTK (Rekening BPP bidang GTK)	0,00	0,00
0011260586	Dispendik Prov. Jatim UPT TIKP (Rekening BPP UPT TIKP)	0,00	0,00
0011260594	Dispendik UPT PTKK Prov. Jatim (Rekening BPP UPT PTKK)	0,00	0,00
0011270271	Cab Dispendik Wil Sidoarjo (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Sidoarjo – Surabaya)	0,00	0,00
0271026625	Cab Dispendik Wil Kab Gresik (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Gresik)	0,00	0,00
0821001153	Kacab Dindik Wil Kab Kota Mjk (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Mojokerto)	0,00	0,00
0111231974	Bend Pengel Dispendik Wil Jombang (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Jombang)	0,00	0,00
0041080507	Cabang Dispendik Wil Mlg Batu (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Kota Malang dan Batu)	0,00	0,00
0041080523	Cabang Dispendik Wil Kab Mlg (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Malang)	0,00	0,00
0081033854	Cab Dispendik Wil Bojonegoro (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Bojonegoro dan Tuban)	0,00	0,00
0281031759	Cab Dindik Wil Kab Lamongan (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Lamongan)	0,00	0,00
0051039475	Cab Dindik Wil Kab & Kota Madiun (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Madiun dan Ngawi)	0,00	0,00
0201008174	BPP Cab Dispendik Wil Kab Ponorogo (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Ponorogo dan Magetan)	0,00	0,00
0211019883	Cab Dispendik Wil Kab Pacitan (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Pacitan)	0,00	0,00
0061033181	Cab Dispendik Wil Kab & Kota Kediri (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Kediri)	0,00	0,00
0191028431	Cabang Dispendik Kab Nganjuk (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Nganjuk)	0,00	0,00
0141035690	Cab Dispendik Kab dan Kota Blitar (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Blitar)	0,00	0,00
0151041418	Cabdin Pendidikan Tulungagung (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Tulungagung dan Trenggalek)	0,00	0,00

No. Rek	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
0281030417	Cab Dispendik Wil Pasuruan (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Pasuruan)	0,00	0,00
0121117401	Cabang Dispendik Probolinggo (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Probolinggo)	0,00	0,00
0031025001	Cabang Dispendik Kab Jember (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Jember dan Lumajang)	0,00	0,00
0311020081	Cab Dispendik Wil Kab Bws (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Bondowoso dan Situbondo)	0,00	0,00
0021031054	Cabdispendik Wil Kab BWI (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Banyuwangi)	0,00	0,00
0251020795	Cab Dinas Pend Wilayah Kab BKL (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Bangkalan)	0,00	0,00
0241400034	Bend Cab Dispendik Wil Kab Spg (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Sampang)	0,00	0,00
0071018041	Cab Dispendik Wilayah Kab Pmk (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Pamekasan)	0,00	0,00
0181034203	Cab Dispendik Wil kab Sumenep (Rekening BPP Cabdin Pendidikan Wilayah Sumenep)	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00

Terdapat sisa Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 sebesar Rp.11.953.152.998,65 yang merupakan :

1. Sisa dana dari penggunaan sisa dana BOS 2019 di tahun 2020 dari SMAN 1 KWANYAR BANGKALAN sebesar 34,65;
2. Sisa dana dari penggunaan Dana BOS 2020 sebesar Rp.11.953.152.964,00.

1.5.1.3.1.1.2. Piutang Pendapatan

5-38 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Pendapatan Sewa Tanah	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

Saldo Piutang Pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0,00.

1.5.1.3.1.1.3. Piutang Lainnya

5-39 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar 0,00.

1.5.1.3.1.1.4. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang – barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.882.613.627,50 dan Rp.1.921.899.006,50.

Tabel 5-40 Rincian Persediaan Per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Pakai Habis	194.319.015,00	319.248.490,00
Cetak dan Penggandaan	218.334.050,00	629.650.560,00
Pakaian dan Atributnya	257.275.562,50	739.877.836,50
Pakaian Khusus dan Hari – hari tertentu	0,00	5.587.120,00
Barang Lainnya	212.685.000,00	227.535.000,00
Persediaan	882.613.627,50	1.921.899.006,50

1.5.1.3.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.5.099.711.636.021,60 dan Rp.4.778.737.855.242,60,00.

Tabel 5-41 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tanah	1.738.026.109.444,00	1.736.274.709.444,00
Peralatan dan Mesin	2.546.666.151.093,30	2.064.228.900.499,30
Gedung dan Bangunan	3.170.334.159.070,00	3.024.004.661.461,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.493.492.957,00	20.074.518.707,00
Aset Tetap Lainnya	263.947.128.481,30	201.393.772.507,30

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.681.955.987,00	1.524.421.725,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.645.437.361.011,00)	(2.268.763.129.101,00)
Aset Tetap	5.099.711.636.021,60	4.778.737.855.242,60

Penambahan nilai Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.740.281.408.057,00 berasal dari :

- Penambahan dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.432.473.272.658,00;
- Penambahan dari realisasi Belanja Modal yang masuk ke aset ekstrakomptabel Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.43.948.125.368,00;
- Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2020 (Reklas dari belanja barang jasa) sebesar Rp.57.195.000,00;
- Realisasi Belanja BPOPP sebesar Rp.255.620.663.511,00;
- Reklas dari Barang dan Jasa ke Aset sebesar Rp.8.182.151.520.

Selain itu selama tahun 2020 juga terdapat pengurangan sebesar Rp.44.616.525.368,00 yang berasal dari :

- Mutasi ke aset ekstrakomptabel karena tidak memenuhi unsur sebagai Aktiva Tetap sebesar Rp.43.948.125.368,00;
- Mutasi ke Aset Lain – lain sebesar Rp.668.400.000,00.

Selain Adanya mutasi atas aset tetap diatas, nilai aset tetap pada neraca juga dipengaruhi oleh akumulasi penyusutan aset tetap yang sifatnya mengurangi nilai aset tetap. Pada tahun 2020 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp.2.645.205.631.011,00 sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.2.268.763.129.101,00. Metode yang digunakan pada penyusutan aset tetap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah metode penyusutan garis lurus dengan nilai residu atau nilai sisa.

1.5.1.3.1.2.1. Tanah

Tabel 5-42 Tanah per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Tanah	1.738.026.109.444,00	1.736.274.709.444,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset Tetap Tanah yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Antara tahun 2019 dan 2020 tidak ada penambahan maupun pengurangan tanah.

1.5.1.3.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Berikut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 2019.

Tabel 5-43 Peralatan dan Mesin per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Alat – alat Besar	8.979.619.415,00	8.826.103.915,00
Alat – alat Angkutan	37.079.276.705,00	35.234.444.630,00
Alat – alat Bengkel	644.345.704.828,00	547.023.553.533,00
Alat – alat Pertanian	12.119.801.825,00	8.623.169.198,00
Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga	1.456.238.772.894,70	1.137.520.646.559,70
Alat – alat Studio dan Komunikasi	190.715.929.091,00	153.714.106.131,00
Alat – alat Kedokteran	15.496.298.398,00	10.701.383.120,00
Alat – alat Laboratorium	180.122.751.633,60	161.245.659.109,60
Alat – alat Persenjataan/Keamanan	1.567.996.303,00	1.339.834.303,00
Peralatan dan Mesin	2.546.666.151.093,30	2.064.228.900.499,30

Perubahan nilai aset Tetap Peralatan dan Mesin disebabkan oleh :

1. Penambahan sebesar Rp.484.400.818.308,00 yang berasal dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal APBD tahun 2020 sebesar Rp.227.165.148.447,00 yang berupa :
 1. Alat – alat besar sebesar Rp.3.000.000,00;
 2. Alat – alat angkutan sebesar Rp.1.384.285.000,00;
 3. Alat – alat bengkel sebesar Rp.77.690.431.300,00;
 4. Alat – alat pertanian sebesar Rp.1.219.249.470,00;
 5. Alat – alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.126.524.377.228,00;
 6. Alat – alat studio dan komunikasi sebesar Rp.13.643.388.935,00;
 7. Alat – alat kedokteran sebesar Rp.1.022.604.119,00;
 8. Alat – alat laboratorium sebesar Rp.5.561.261.595,00;
 9. Alat – alat persenjataan/keamanan sebesar Rp.116.550.800,00.
 - b. Realisasi Belanja Modal yang masuk sebagai Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp.2.148.567.714,00 yang berupa :
 1. Alat – alat bengkel sebesar Rp.46.558.019,00;
 2. Alat – alat pertanian sebesar Rp.1.097.000,00;
 3. Alat – alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.1.646.277.860,00;
 4. Alat – alat studio dan komunikasi sebesar Rp.65.702.500,00;
 5. Alat – alat kedokteran sebesar Rp.15.025.500,00;
 6. Alat – alat laboratorium sebesar Rp.372.457.835,00;
 7. Alat – alat persenjataan/keamanan sebesar Rp.1.449.000,00.
 - c. Realisasi Belanja Lainnya (Reklas dari belanja barang jasa) sebesar Rp.57.195.000,00, meliputi :

1. Alat – alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.24.695.000,00;
 2. Alat – alat studio dan komunikasi sebesar Rp.32.500.000.
- d. Realisasi Belanja BPOPP sebesar Rp.246.875.936.027,00, meliputi :
1. Alat – alat besar sebesar Rp.150.515.500,00;
 2. Alat – alat angkutan sebesar Rp.275.547.075,00;
 3. Alat – alat bengkel sebesar Rp.18.849.659.995,00;
 4. Alat – alat pertanian sebesar Rp.2.277.383.157,00;
 5. Alat – alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.189.940.214.987,00;
 6. Alat – alat studio dan komunikasi sebesar Rp.20.190.572.025,00;
 7. Alat – alat kedokteran sebesar Rp.1.766.401.159,00;
 8. Alat – alat laboratorium sebesar Rp.13.314.030.929,00;
 9. Alat – alat persenjataan/keamanan sebesar Rp.111.611.200,00.
- e. Reklas dari Belanja barang jasa BOS atas penggunaan sisa dana 2019 yang dianggarkan kembali ke aset tetap sebesar Rp.8.153.971.120,00, meliputi :
1. Alat – alat bengkel sebesar Rp.782.060.000,00;
 2. Alat – alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.2.228.839.120,00;
 3. Alat – alat studio dan komunikasi sebesar Rp.3.135.362.000,00;
 4. Alat – alat kedokteran sebesar Rp.2.005.910.000,00;
 5. Alat – alat laboratorium sebesar Rp.1.800.000,00.
2. Pengurangan sebesar Rp.2.148.567.714,00 yang berasal dari mutasi ke aset ekstrakomtabel atas barang – barang dengan harga perolehan satuan yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap, meliputi :
- a. Alat – alat bengkel sebesar Rp.46.558.019,00;
 - b. Alat – alat pertanian sebesar Rp.1.097.000,00;
 - c. Alat – alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp.1.646.277.860;
 - d. Alat – alat studio dan komunikasi sebesar Rp.65.702.500,00;
 - e. Alat – alat kedokteran sebesar Rp.15.025.500,00;
 - f. Alat – alat laboratorium sebesar Rp.372.457.835,00;
 - g. Alat – alat persenjataan/keamanan sebesar Rp.1.449.000,00.

1.5.1.3.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Berikut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel 5-44 Gedung dan Bangunan per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Bangunan Gedung	3.168.971.115.170,00	3.022.641.617.561,00
Monumen	1.363.043.900,00	1.363.043.900,00
Gedung dan Bangunan	3.170.334.159.070,00	3.024.004.661.461,00

Perubahan nilai aset Tetap Gedung dan Bangunan disebabkan oleh :

1. Penambahan sebesar Rp.146.971.098.509,00 yang berasal dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal APBD tahun 2020 sebesar Rp.146.774.806.609,00;
 - b. Realisasi Belanja Modal yang masuk sebagai Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp.19.930.900,00;
 - c. Realisasi Belanja BPOPP sebesar Rp.176.361.000,00.
2. Pengurangan sebesar Rp.668.330.900,00 yang berasal dari :
 - a. Mutasi ke aset ekstrakomtabel atas barang – barang dengan harga perolehan satuan yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp.19.930.900,00;
 - b. Mutasi ke aset lain – lain sebesar Rp.668.400.000,00.

1.5.1.3.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel 5-45 Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Jalan dan Jembatan	5.576.943.500,00	5.438.615.500,00
Bangunan Air	5.898.633.432,00	5.859.628.432,00
Instalasi	4.086.483.044,00	4.049.025.544,00
Jaringan	4.931.432.981,00	4.727.249.231,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.493.492.957,00	20.074.518.707,00

Perubahan nilai aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan oleh :

1. Penambahan sebesar Rp.418.974.250,00 yang berasal dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal APBD tahun 2020 sebesar Rp.152.409.500,00 yang berupa :
 1. Bangunan Air sebesar Rp.10.000.000,00;
 2. Instalasi sebesar Rp.37.457.500,00;
 3. Jaringan sebesar Rp.104.952.000,00.
 - b. Realisasi Belanja BPOPP sebesar Rp.246.875.936.027,00, meliputi :
 1. Jalan dan jembatan sebesar Rp.138.328.000,00;
 2. Bangunan Air sebesar Rp.29.005.000,00;
 3. Jaringan sebesar Rp.99.231.750,00.

1.5.1.3.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Berikut merupakan saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel 5-46 Aset Tetap Lainnya per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Buku/Perpustakaan	225.526.381.162,30	167.294.051.570,30
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	37.586.045.489,00	33.275.019.107,00
Hewan/Ternak dan Tumbuh – tumbuhan	834.701.830,00	824.701.830,00
Aset Tetap Lainnya	263.947.128.481,30	201.393.772.507,30

1. Penambahan sebesar Rp.104.332.982.728,00 yang berasal dari :
 - a. Realisasi Belanja Modal APBD tahun 2020 sebesar Rp.54.223.373.840,00 yang berupa :
 1. Buku/Perpustakaan sebesar Rp.51.471.522.228,00;
 2. Barang bercorak kesenian, kebudayaan sebesar Rp.2.751.851.612,00;
 - b. Realisasi Belanja Modal yang masuk sebagai Aset Ekstrakomtabel sebesar Rp.41.779.626.754,00 yang berupa :
 1. Buku/Perpustakaan sebesar Rp.41.722.855.804,00;
 2. Barang bercorak kesenian, kebudayaan sebesar Rp.56.770.950,00.
 - c. Realisasi Belanja BPOPP sebesar Rp.8.301.801.734,00, meliputi :
 1. Buku/Perpustakaan sebesar Rp.6.732.626.964,00;
 2. Barang bercorak kesenian, kebudayaan sebesar Rp.1.559.174.770,00;
 3. Hewan/ternak dan tumbuh – tumbuhan sebesar Rp.10.000.000,00.
 - d. Reklas dari Belanja barang jasa BOS atas penggunaan sisa dana 2019 yang dianggarkan kembali ke aset tetap berupa buku/perpustakaan sebesar Rp.28.180.400,00.
2. Pengurangan sebesar Rp.41.779.626.754,00 yang berasal dari mutasi ke aset ekstrakomtabel atas barang – barang dengan harga perolehan satuan yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi aset tetap, meliputi :
 - a. Buku/Perpustakaan sebesar Rp.41.722.855.804,00;
 - b. Barang bercorak kesenian, kebudayaan sebesar Rp.56.770.950,00;

1.5.1.3.1.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel 5-47 Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.681.955.987,00	1.524.421.725,00

Perubahan nilai aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan disebabkan oleh penambahan sebesar Rp.4.157.534.262,00 yang berasal dari Realisasi Belanja Modal APBD 2020.

1.5.1.3.1.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel 5-48 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.645.437.361.011,00)	(2.268.763.129.101,00)

1.5.1.3.1.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.7.754.901.940,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 Rp.6.942.453.457,00 meningkat sebesar 11,70%.

Tabel 5-49 Aset Lainnya per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Tidak Berwujud	6.807.902.940,00	5.995.454.457,00
Aset Lain – lain	946.999.000,00	946.999.000,00
Aset Lainnya	7.754.901.940,00	6.942.453.457,00

1.5.1.3.1.3.1. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.6.807.902.940,00 dan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 Rp.5.995.454.457,00 meningkat sebesar 33,77%.

Tabel 5-50 Aset Tidak Berwujud per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Software	9.918.464.149,00	8.013.181.349,00
Lisensi dan Franchise	39.930.000,00	39.930.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.150.491.209,00)	(2.057.656.892,00)
Aset Tidak Berwujud	6.807.902.940,00	5.995.454.457,00

Penambahan Jumlah Aset tidak berwujud sebesar Rp.1.905.282.800,00, antara lain meliputi :

1. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.771.795.300,00;
2. Realisasi Belanja BPOPP sebesar Rp.133.487.500.

1.5.1.3.1.3.2. Aset Lain – lain

Berikut merupakan saldo Aset Lain – lain yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Tabel 5-51 Aset Lain – lain per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset Lain – lain	946.999.000,00	946.999.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain – lain	(0,00)	(0,00)
Aset Lain – lain	946.999.000,00	946.999.000,00

1.5.1.3.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Saldo kewajiban Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-52 Kewajiban per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kewajiban Jangka Pendek	548.513.387,92	492.654.401,96
Kewajiban	548.513.387,92	492.654.401,96

1.5.1.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-53 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Diterima Dimuka	306.249.999,92	179.999.999,96
Utang Belanja	242.263.388,00	312.654.402,00
Kewajiban Jangka Pendek	548.513.387,92	492.654.401,96

1.5.1.3.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-54 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Diterima Dimuka – Lain – lain PAD yang Sah	306.249.999,92	179.999.999,96
Pendapatan Diterima Dimuka	306.249.999,92	179.999.999,96

Pendapatan Diterima Dimuka Lain – lain PAD yang sah pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.306.249.999,92 yang berasal dari :

1. Sewa Lahan oleh PT. Telekomunikasi Selular untuk Menara BTS di SMAN 9 Malang periode April 2017 sampai dengan Maret 2022 dengan harga sewa sebesar Rp.400.000.000,00. Pada tahun 2020 tersisa sebesar Rp.99.999.999,92 dengan pengakuan pendapatan bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp.80.000.000,04 atau sebesar Rp.6.666.666,67 per bulan.
2. Sewa Gedung dan Bangunan untuk Pemasangan Reklame di Jalan Padmosusastro No. 53 Surabaya oleh PT. Oxcy Jaya Putra periode 5 September 2019 sampai dengan 5

September 2024 dengan harga sewa sebesar Rp.275.000.000,00. Pada tahun 2020 tersisa sebesar Rp.206.250.000,00 dengan pengakuan pendapatan bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp.68.750.000,00 atau sebesar Rp.4.583.333,33.

1.5.1.3.2.1.2. Utang Belanja

Saldo utang belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-55 Utang Belanja per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Utang Belanja Barang dan Jasa	242.263.388,00	312.654.402,00
Utang Belanja	242.263.388,00	312.654.402,00

Utang belanja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan Utang Belanja Jasa sebesar Rp.242.263.388,00, yang merupakan utang atas beban utilitas (listrik, air, dan telepon).

1.5.1.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Jumlah ekuitas Kekayaan Bersih Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 5-56 Ekuitas per 31 Desember

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas	(16.883.262.619.977,40)	(12.069.400.955.594,50)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	22.003.016.411.177,20	16.896.472.841.535,30
Ekuitas	5.119.753.791.199,83	4.827.071.885.940,87

1.5.1.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO, dampak kumulatif, perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

Tabel 5-57 Perhitungan LPE

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas Awal	4.827.071.885.940,87	4.488.984.531.249,51
Surplus/Defisit – LO	(5.927.546.750.337,96)	(5.848.424.717.469,67)
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	5.106.543.569.641,92	6.188.330.739.105,03
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.113.685.085.955,00	(1.818.666.944,00)
Ekuitas Akhir	5.119.753.791.199,83	4.827.071.885.940,87

1.5.1.4.1. Ekuitas Awal

Berikut adalah saldo awal ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan 2019.

Tabel 5-58 Perbandingan Ekuitas Awal

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas Awal	4.827.071.885.940,87	4.488.984.531.249,51

Jumlah Ekuitas Awal tahun 2020 adalah Rp.4.827.071.885.940,87 yang merupakan saldo akhir tahun 2019.

1.5.1.4.2. Surplus/Defisit LO

Berikut adalah Surplus/Defisit – LO Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan 2019.

Tabel 5-59 Perbandingan Surplus/Defisit – LO

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Surplus/Defisit – LO	(5.927.546.750.337,96)	(5.848.424.717.469,67)

1.5.1.4.3. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Berikut adalah Ekuitas untuk dikonsolidasikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan 2019.

Tabel 5-60 Perbandingan Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas untuk dikonsolidasikan	5.106.543.569.641,92	6.188.330.739.105,03

Ekuitas untuk dikonsolidasikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.5.106.543.569.641,92 yang merupakan mutasi atas R/K PPKD selama tahun 2020.

1.5.1.4.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Berikut adalah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan 2019.

Tabel 5-61 Perbandingan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	1.113.685.085.955,00	(1.818.666.944,00)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Penyesuaian Ekuitas sebesar Rp.1.111.933.685.955,00 timbul sebagai akibat adanya kebijakan yang mengakibatkan penyesuaian ekuitas yaitu :

Tabel 5-62 Kebijakan yang mengakibatkan penyesuaian ekuitas

No	Uraian	Jumlah
1.	Pencatatan Aset tak berwujud dari dana BPOPP tahun 2019	46.973.334,00
2.	Pencatatan Aset Tetap dari dana BPOPP tahun 2019	72.856.882.816,00
3.	Koreksi Saldo Awal Penyusutan karena perbaikan database dan penghitungan ulang penyusutan	(2.762.968,00)
4.	Belanja Pegawai BOS 2020	125.164.512.030,00
5.	Belanja Barang dan Jasa BOS 2020	692.001.328.530,00
6.	Pengakuan sisa dana BOS 2020	11.953.152.964,00
6.	Aset Tetap BOS 2020	209.983.885.796,00
7.	Pengembalian sisa penggunaan dana BOS 2019 yang disetor pada tahun 2019	(70.286.547,00)
8.	Penambahan aset hasil pengalihan dari 0501 Bina Marga Penambahan Aset Hasil Pengalihan dari 0301 Bakorwil Madiun Penambahan aset hasil pengalihan dari 1303 BPKAD (SKPKD)	108.900.000,00
9.	Penambahan aset hasil pengalihan dari 0501 Bina Marga Penambahan Aset Hasil Pengalihan dari 0301 Bakorwil Madiun Penambahan aset hasil pengalihan dari 1303 BPKAD (SKPKD)	1.642.500.000,00
	JUMLAH	1.113.685.085.955,00

1.5.1.4.5. Ekuitas Akhir

Berikut adalah Ekuitas Akhir Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 dan 2019.

Tabel 5-63 Perbandingan Ekuitas Akhir

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas Akhir	5.119.753.791.199,83	4.827.071.885.940,87

1.5.2. Pengungkapan atas pos – pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Bab II pasal 4 bahwa pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dengan adanya implementasi akuntansi berbasis akrual ini akan menyebabkan timbulnya pos-pos aset maupun kewajiban.

1.5.2.1. Penjelasan Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut (dalam rupiah) :

Tabel 5-64 Ringkasan Neraca

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Aset	5.120.302.304.587,75	4.827.564.540.342,83
Aset Lancar	12.835.766.626,15	41.884.231.643,23
Aset Tetap setelah penyusutan	5.099.711.636.021,60	4.778.737.855.242,60
Aset Lainnya	7.754.901.940,00	6.942.453.457,00
Kewajiban	548.513.387,92	492.654.401,96
Kewajiban Jk. Pendek	548.513.387,92	492.654.401,96
Kewajiban Jk. Panjang	0,00	0,00
Ekuitas	5.119.753.791.199,83	4.827.071.885.940,87
Ekuitas	(16.883.262.619.977,40)	(12.069.400.955.594,50)
Ekuitas SAL	0,00	0,00
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	22.003.016.411.177,20	16.896.472.841.535,30

- a. Dengan berlakunya akuntansi berbasis akrual, maka total aset yang disajikan pada neraca merupakan nilai aset dan penyusutannya. Demikian pula dengan aset tidak berwujud yang merupakan nilai aset tidak berwujud setelah dikurangi dengan amortisasi.

Tabel 5-65 Rincian Total Aset

ASET TETAP	2020	2019
Tanah	1.738.026.109.444,00	1.736.274.709.444,00
Peralatan dan Mesin	2.546.666.151.093,30	2.064.228.900.499,30
Gedung dan Bangunan	3.170.334.159.070,00	3.024.004.661.461,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.493.492.957,00	20.074.518.707,00
Aset Tetap Lainnya	263.947.128.481,30	201.393.772.507,30
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.681.955.987,00	1.524.421.725,00
Akumulasi Penyusutan	-2.645.437.361.011,00	(2.268.763.129.101,00)
JUMLAH ASET TETAP	5.099.711.636.021,60	4.778.737.855.242,60
ASET LAINNYA		
Aset Tidak Berwujud	6.807.902.940,00	5.995.454.457,00
Aset Lain-lain	946.999.000,00	946.999.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	7.754.901.940,00	6.942.453.457,00

- b. Pada pos kewajiban, timbulnya kewajiban jangka pendek dikarenakan adanya utang utilitas (listrik, air, dan telepon) pemakaian bulan Desember yang baru timbul tagihannya di bulan Januari tahun berikutnya dan Pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah.

Tabel 5-66 Rincian Kewajiban

KEWAJIBAN	2020	2019
Pendapatan Diterima Dimuka	306.249.999,92	179.999.999,96
Utang Belanja	242.263.388,00	312.654.402,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	548.513.387,92	492.654.401,96

1.6. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1.6.2. Visi dan Misi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur :

1. Visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yaitu :
Terwujudnya insan yang cerdas, berakhlak, professional dan berbudaya.

2. Misi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yaitu :
 - a. Mewujudkan pemerataan pendidikan dengan meningkatkan angka partisipasi murni dan nilai transisi dan menurunkan angka putus sekolah dan luar sekolah;
 - b. Mewujudkan kelangsungan program pemberian bantuan pendidikan;
 - c. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan menaikkan nilai rata-rata hasil evaluasi akhir pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan melalui kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. Meningkatkan peran serta pendidikan dalam pembangunan daerah dan pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Memfasilitasi perencanaan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan di seluruh wilayah Jawa Timur;
 - f. Mewujudkan internalisasi nilai budaya kepada pelajar melalui kegiatan pergelaran, festival, pameran, parade dan bentuk sajian seni budaya yang positif.

1.6.3. Domisili

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jl. Gentengkali No. 33 Surabaya Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Dinas Pendidikan terdiri dari bidang, UPT, dan Cabang Dinas yaitu :

1. Sekretariat
2. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)
3. Bidang Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas
4. Bidang Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
5. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
6. UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP)
7. UPT. Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan
8. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Surabaya dan Sidoarjo
9. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Gresik
10. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab/Kota Mojokerto
11. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Jombang
12. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab. Malang
13. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kota Malang dan Kota Batu
14. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Bojonegoro dan Tuban

15. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Lamongan
16. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab/Kota Madiun dan Ngawi
17. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Magetan dan Ponorogo
18. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Pacitan
19. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab/Kota Kediri
20. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Nganjuk
21. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Kab/Kota Blitar
22. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Tulungagung dan Trenggalek
23. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Pasuruan
24. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Probolinggo
25. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Lumajang dan Jember
26. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Bondowoso dan Situbondo
27. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Banyuwangi
28. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Bangkalan
29. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Sampang
30. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Pamekasan
31. Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur wilayah Sumenep

1.6.4. Program Kegiatan Dinas Pendidikan Prov. Jatim

Dinas Pendidikan merupakan instansi teknis yang berperan di bidang pendidikan, dalam pelaksanaan operasionalnya tugas pokok mengacu pada pedoman atau petunjuk yang diterbitkan oleh daerah dan pusat. Kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Jawa Timur. Pemerataan pembangunan Pendidikan di Jawa Timur antara lain :

- a. Program Pelayanan Kesekretariatan, meliputi :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
 - Pengelolaan Administrasi Keuangan
 - Ketatausahaan dan Kepegawaian
- b. Program Pengembangan Teknis Ketrampilan Kejuruan (Inkubator), meliputi :
 - Penyelenggaraan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Ketrampilan dan Kejuruan
 - Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Pengembangan Teknis Keterampilan Kejuruan
 - Penyelenggaraan Materi Metode Pelatihan Berbasis Ketrampilan Vokasi
- c. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sidoarjo
 - Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya

- Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK-PLK di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya
- d. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Malang
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kabupaten Malang
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Malang
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Malang
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kota Malang
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kota Malang dan Kota Batu
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Kota Malang dan Kota Batu
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Malang dan Kota Batu
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kota Malang dan Kota Batu
- f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Ponorogo
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan
- g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Tulungagung
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

- Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
- h. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Gresik
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Gresik
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Gresik
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Gresik
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Gresik
- i. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Mojokerto
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Mojokerto
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten/Kota Mojokerto
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Mojokerto
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Mojokerto
- j. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bojonegoro
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban
- k. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Lamongan
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Lamongan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Lamongan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Lamongan
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Lamongan
- l. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Madiun
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi

- Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi
- m. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pacitan
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pacitan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Pacitan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Pacitan
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Pacitan
- n. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Kediri
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Kediri
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten/Kota Kediri
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Kediri
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Kediri
- o. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Nganjuk
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Nganjuk
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Nganjuk
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Nganjuk
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Nganjuk
- p. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Blitar
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Blitar
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten/Kota Blitar
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Blitar
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Blitar
- q. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pasuruan
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Pasuruan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten/Kota Pasuruan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Pasuruan

- Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Pasuruan
- r. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK), meliputi :
- Penyelenggaraan DAK Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
 - Mutu dan Relevansi Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
 - Mutu Prestasi Peserta Didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
 - Manajemen Kelembagaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
 - Sarana dan Prasarana PK – PLK
 - Penyelenggaraan BOS Pendidikan Khusus
- s. Program Pendidikan Menengah Atas, meliputi :
- Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Atas
 - Mutu dan Relevansi Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - Mutu Prestasi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
 - Penyelenggaraan DAK Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - Penyelenggaraan SMAN Olahraga Sidoarjo
 - Manajemen Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- t. Program Pendidikan Menengah Kejuruan, meliputi :
- Mutu dan Relevansi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - Penyelenggaraan BOS Pendidikan SMK
 - Manajemen Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - Mutu Prestasi Peserta Didik SMK
 - Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan
 - Penyelenggaraan DAK Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- u. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan, meliputi :
- Pengembangan Metode Belajar Mengajar Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Penyebarluasan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
 - Penyelenggaraan Penatausahaan di UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP)
- v. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Probolinggo
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota Probolinggo
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten/Kota Probolinggo

- Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten/Kota Probolinggo
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten/Kota Probolinggo
- w. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Jember
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang
- x. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bondowoso
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo
- y. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Banyuwangi
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Banyuwangi
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Banyuwangi
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Banyuwangi
- z. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangkalan
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangkalan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Bangkalan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Bangkalan
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Bangkalan
- aa. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sampang
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sampang

- Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Sampang
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sampang
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sampang
- bb. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Pamekasan
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Pamekasan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Pamekasan
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Pamekasan
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Pamekasan
- cc. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Wilayah Sumenep
- Penyelenggaraan Penatausahaan Cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumenep
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMA dan PK – PLK di Kabupaten Sumenep
 - Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan SMK di Kabupaten Sumenep
 - Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di Kabupaten Sumenep
- dd. Program Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, meliputi :
- Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, serta Fungsi Penyelenggaraan Bantuan
 - Tugas Pembantuan Bidang Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan
- ee. Program Peningkatan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan, meliputi :
- Manajemen Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - Pendidikan Lanjutan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan
 - Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
 - Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi
 - Penyelenggaraan Manajemen Karir Guru dan Tenaga Kependidikan
 - Perlindungan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

1.7. PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 telah disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan Keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh – jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur disusun dengan menerapkan akuntansi berbasis akrual dan diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan serta dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan.